

**SKRIPSI**

**ANALISIS TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI  
MASYARAKAT SETEMPAT (OMS) DALAM PENGADAAN RUMAH  
LAYAK HUNI DI DESA KOTO TINGGI KECAMATAN RAMBAH  
KABUPATEN ROKAN HULU**

Diajukan untuk Menyelesaikan Studi  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Administrasi Negara



OLEH :

**MUHAMMAD MAKSUM**

**10675005159**

**PROGRAM STUDI S.1  
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2012**

**ABSTRAK**  
**ANALISIS TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI**  
**MASYARAKAT SETEMPAT (OMS) DALAM PENGADAAN RUMAH**  
**LAYAK HUNI DI DESA KOTO TINGGI KECAMATAN RAMBAH**  
**KABUPATEN ROKAN HULU**

**OLEH : MUHAMMAD MAKSUM**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tugas dan tanggung jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam pengadaan Rumah Layak Huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tugas dan tanggung jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Adapun perumusan masalah penelitian adalah : Bagaimana tugas dan tanggung jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam Pengadaan Rumah Layak Huni ?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang dilaksanakan di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat penerima bantuan Rumah Sederhana Layak Huni yang ada di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2009, yakni sebanyak 110 Kepala Keluarga (KK), seorang Kepala Desa, serta pengurus OMS dan TPM di desa tersebut. Sementara itu sampel yang digunakan adalah simple random sampling, karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Maka dalam penelitian ini sampel yang diambil terdiri dari 20 warga masyarakat penerima bantuan Rumah Sederhana Layak Huni yang ada di desa Koto Tinggi kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2009, seorang Kepala Desa, serta 3 orang pengurus OMS dan 2 orang TPM di desa tersebut. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari tempat penelitian dengan cara kuisioner, wawancara dan observasi. Data yang telah dikumpulkan, lalu dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam pengadaan pemukiman masyarakat di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Adapun faktor penghambat yang dialami oleh OMS adalah : (a) Masih rendahnya kepedulian masyarakat untuk berperan serta dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa dalam menyampaikan gagasan dan saran mengenai pembangunan yang perlu diprioritaskan di desa; (b) Belum lengkapnya data dan informasi mengenai masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan pemukiman. Hal ini mengakibatkan pemberian bantuan rumah sederhana layak huni bagi masyarakat desa kurang tepat sasaran, dimana belum secara keseluruhan masyarakat miskin yang berhak mendapatkan rumah sederhana layak huni tersebut, sedangkan mereka telah memenuhi syarat atau kriteria untuk mendapatkan rumah sederhana layak huni sesuai program kebijakan

pemerintah daerah; dan (c) Belum memadai ketersediaan tenaga teknis yang ada yang akan membantu OMS dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya mengidentifikasi usulan kegiatan masyarakat desa, menyusun rencana kegiatan pembangunan dan anggaran biaya pembangunan, serta pengawasan kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana desa yang dilaksanakan.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah SWT, dengan segala apa yang telah dilimpahkan-Nya kepada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada bidang ilmu-ilmu sosial Program Studi Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau Pekanbaru.

Penulisan skripsi ini menganalisis dan membahas tentang fungsi pengawasan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni, dengan judul penelitian : **Analisis Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Dalam Pengadaan Rumah Layak Huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.**

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, pengarahan serta motivasi yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak DR. Mahendra Romus SE, Mec., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau Pekanbaru.
2. Bapak Drs. Almasri, M.Si., selaku Ketua jurusan Administrasi Negara di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau Pekanbaru.
3. Bapak Riki Hanri Malu, SE, MM., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan bimbingan serta arahan selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Rusdi, S.Sos, MA., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia memberikan bimbingan serta arahan selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak/ Ibu Dosen beserta seluruh Staf Pegawai, khususnya pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau Pekanbaru.
6. Bapak Asmi Jumairi, selaku Kepala Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian ini.

7. Pimpinan beserta Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yang telah memberikan kemudahan kepada penulis selama mengumpulkan data dan informasi saat penelitian.
8. Kepada kedua Orang Tua saya H. Wan Nurdin dan Ibunda Hj. Yuridis yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang tak hentinya tanpa mengenal putus asa.
9. Kepada Adinda Mardiana yang telah memotivasi penulis dalam segala hal dan setia dalam segala cobaan.
10. Buat rekan-rekan yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengharapkan kritik yang membangun dan saran yang berguna untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini nantinya. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berharga dan mendapatkan keridhoan dari Allah SWT, dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga bagi pembacanya, *Amin*.

## DAFTAR ISI

Hal

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	
PERSEMBAHAN.....	
MOTTO .....	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II. TELAAH PUSTAKA	
A. Pemerintah .....	18
B. Konsep Pembangunan.....	20
C. Pembangunan Daerah .....	21
D. Partisipasi Masyarakat.....	29
E. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) bidang rumah layak huni (RLSH).....	31
F. Konsep Operasional .....	38
G. Indikator Penelitian .....	39
H. Teknik Pengukuran .....	40
I. Hipotesis .....	42

### BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Populasi dan Sampel .....	44
D. Teknik Penarikan Sampel .....	44
E. Jenis dan Sumber Data.....	46
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Analisa Data.....	47

### BAB IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu .....	48
B. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.....	51

### BAB V. HASIL DAN ANALISA DATA

A. Identitas Responden .....	54
B. Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu .....	57
C. Hambatan-hambatan yang Mempengaruhi Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam Pengadaan Rumah Sederhana Layak Huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu .....	92

### BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	97

DAFTAR PUSTAKA .....	100
----------------------	-----

### LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Daftar Penerima Bantuan RSLH Hasil Perifikasi Akhir Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu .....	11
Tabel I.2 Daftar yang Tidak menerima Bantuan RSLH Hasil Perifikasi Akhir Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu .....	12
Tabel III.1 Distribusi Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian.....	44
Tabel IV.1 Data Wilayah Administrasi Desa Koto Tinggi.....	49
Tabel IV.2 Jumlah Populasi Penduduk Desa Koto Tinggi .....	49
Tabel IV.3 Prasarana Pendidikan.....	50
Tabel V.1 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kepala Desa, Pengurus OMS dan TPM .....	53
Tabel V.2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur .....	55
Tabel V.3 Identitas Responden Masyarakat Penerima Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) Menurut Tingkat Umur .....	55
Tabel V.4. Identitas Responden Masyarakat Penerima Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) Menurut Pekerjaan/ Mata Pencarian .....	56
Tabel V.5 Tanggapan Responden Tentang OMS dalam Mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan Desa .....	59
Tabel V.6 Tanggapan Responden Tentang OMS dalam Menentukan Sarana dan Prasarana yang Harus Segera direalisasikan .....	63
Tabel V.7 Tanggapan Responden Tentang OMS Dalam Melakukan Pendataan Keluarga Miskin Secara Komprehensif .....	68
Tabel V.8 Tanggapan Responden Tentang OMS Dalam Melakukan Pendataan Keluarga Miskin Secara Adil.....	71
Tabel V.9 Tanggapan Responden Tentang OMS dalam Menyusun Rencana Pembangunan Sarana/ prasarana .....	75
Tabel V.10 Tanggapan Responden Tentang OMS dalam Menyusun Anggaran Pembangunan Sarana/ prasana.....	79
Tabel V.11. Tanggapan Responden Tentang OMS dalam Memberikan Kesempatan Kepada Masyarakat Untuk Menyampaikan Gagasan/ saran .....	84



Tabel V.12. Tanggapan Responden Tentang OMS untuk Melibatkan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan	Desa.....	87
---	-----------	----

Tabel V.13. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Fungsi Pengawasan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam Pengadaan Rumah Layak Huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.....	91
--	----

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **A. Pemerintahan**

Negara Republik Indonesia adalah sebagai negara kesatuan menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. (Bratakusumah, dkk, 2001:1)

Dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakara sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.

Menurut Syafeei (2004) : Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan.

Adanya pemerintahan berbeda pada masing-masing negara disebut dengan sistem pemerintahan. Sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang kait mengait satu sama lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk sistem dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian yang terkecil, rusaknyalah satu bagian

akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri. Pemerintahan Indonesia adalah suatu contoh sistem pemerintahan, dan anak cabangnya adalah sistem pemerintahan daerah kemudian seterusnya sistem pemerintahan desa/ kelurahan, (Syafeei,2005 : 87-88).

Adapaun azas penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah sebagai berikut :

a. Azas Desentralisasi

Azas Desentralisasi adalah asas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

b. Azas Dekonsentrasi

Azas Dekonsentrasi adalah azas pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah, atau kepada instansi vertikal tingkat atasnya, kepada pejabat-pejabat di daerah.

c. Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan adalah azas untuk turut sertanya pemerintah daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya, (Syafeei, dkk., 2002 : 110).

Maka dari itu, pemerintah desa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten dan kota, dituntut selalu proaktif dalam menjalankan fungsi pelayanan pemerintahan sehingga tercapai tujuan negara dalam rangka menciptakan pelayanan masyarakat secara efektif.

## **B. Konsep Pembangunan**

Dalam studi setiap kehidupan sosial adalah adanya perubahan dan pertumbuhan atau perkembangan yang terjadi secara terus menerus tanpa akhir, usaha manusia yang dituangkan

dalam bentuk kegiatan secara terus menerus agar terjadi perubahan, pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan yang dikehendaki pada umumnya disebut dengan pembangunan.

Adapun Konsep Pembangunan menurut Hamim (2003 : 1), sekurang-kurangnya mengandung empat arti, yakni :

- Pertama, pembangunan sebagai kata tunggal memiliki makna majemuk;
- Kedua, sebagai kata sifat pembangunan kondisi yang lebih baik dari keadaan yang sebelumnya;
- Ketiga, sebagai kata benda pembangunan berkaitan dengan output atau hasil dari suatu kegiatan; dan
- Keempat, pembangunan sebagai kata kerja diartikan sebagai proses kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu panjang dan terus-menerus.

Ndraha (1990) dalam Hamim (2003 : 1-2) memberikan pengertian pembangunan sebagai konsep pertumbuhan (*growth*), rekonstruksi (*reconstruction*), modernisasi (*modernization*), westernisasi (*westernization*), perubahan sosial (*social change*), pembebasan (*liberation*), pembaharuan (*innovation*), pembangunan bangsa (*nation building*), pembangunan nasional (*national development*), pengembangan dan pembinaan.

Tjokroamijoyo dan Mustopadidjaya (1993) menyatakan bahwa ada lima dimensi penting dalam pembangunan, yakni :

- Pertama, kesejahteraan sosial ekonomi, terutama indikator pertumbuhan ekonomi;
- Kedua, transformasi sosial dari masyarakat tradisional kearah masyarakat maju;
- Ketiga, pembangunan bangsa/ sosial politik;
- Keempat, menempatkan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya, dalam proses pembangunan; dan

- Kelima, manusia sebagai pusat perhatian proses pembangunan. (Hamim, 2003 : 13)

### **C. Pembangunan Daerah**

Menurut Soemarwoto (1993 : 139), Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk menaikkan taraf atau tingkat hidup dan dapat pula dikatakan bahwa pembangunan bertujuan untuk menaikkan mutu kehidupan karena mutu hidup rakyat diartikan sebagai derajat dipenuhi kebutuhan dasar. Jadi pembangunan dapat diartikan sebagai usaha memenuhi kebutuhan dasar rakyat yang lebih baik.

Lebih lanjut dikatakan oleh Suryadi (1975 : 64) bahwa pembangunan adalah suatu proses dimana masyarakat mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut.

Karena wilayah kecamatan terdiri dari desa-desa/ kelurahan, maka sasaran pembangunan di wilayah kecamatan merupakan pengembangan, penyediaan peningkatan sarana prasarana infrastruktur yang dibutuhkan di desa-desa/ kelurahan tersebut.

Menurut Siagian (2008 : 4) bahwa pembangunan adalah sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah majun modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan itu merupakan suatu proses kegiatan; usaha yang secara sadar dilakukan oleh masyarakat; mengarah kepada perubahan yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat; dan pada prinsipnya lebih menuju kearah yang lebih baik.

Pembangunan suatu bangsa tidak hanya dilakukan dan dibedakan kepada sekelompok orang saja melainkan juga harus melibatkan rakyat banyak yang juga akan menjadi subjek dan

sekaligus objek dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan merupakan semacam arah perjalanan yang sedang ditempuh oleh manusia pada situasi tertentu, sehingga sejauh mungkin harus mengikut sertakan masyarakat untuk berperan dalam menentukan pilihan-pilihannya yang mendasar. Dengan demikian jelaslah bahwa apabila perjalanan pembangunan ingin berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan, maka partisipasi masyarakat tidak bisa diabaikan dalam kerangka dasar proses pembangunan. Oleh karena itu pembangunan nasional yang melibatkan perubahan-perubahan dasar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional (Siagian, 1986 : 15-16).

Dari pendapat tersebut dapatlah dikatakan bahwa pada dasarnya peran serta masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan tersebut. Kecamatan yang terdiri dari desa-desa adalah sebagai salah satu objek dan sekaligus subjek pembangunan, karena di desalah tempat tinggal sebagian besar penduduk Indonesia, sehingga dengan menumbuhkan pembangunan pedesaan berarti membangun masyarakatnya. Sedangkan sebagai subjek desa merupakan pemberdayaan dari masyarakat sendiri melalui kewenangan pembangunan desa sesuai dengan kemampuan dan kemauan masyarakatnya.

Masyarakat pedesaan di Indonesai menurut sumber statistik Nasional yang diakui meliputi 80% dari keseluruhan wilayah/ teritori Nasional. Masyarakat pedesaan tidak hanya meliputi masyarakat petani, akan tetapi juga meliputi keseluruhan kelompok masyarakat produsen kecil/ pengusaha niaga tani serta tenaga kerja yang bersangkutan dalam bidang tersebut.

Mengenai tingkat kemampuan warga masyarakat pedesaan umumnya dibidang teknologi pertanian dan usaha niaga tani masih dalam tingkat perkembangan tradisional

dibandingkan dengan kemajuan di bidang teknologi dan usaha ekonomi dewasa ini. Apabila masyarakat pedesaan tersebut dibiarkan berkembang berdasar kemampuan sendiri, akan berakibat timbulnya jurang yang makin lebar dan mendalam dengan warga masyarakat lainnya yang sudah maju. Memahami masalah tersebut pemerintah kita telah mengadaptir konsepsi dan metode gerakan *community development* menjadi salah satu program guna mempercepat peningkatan potensi masyarakat pedesaan di Indonesia, yang untuk pertama kali merupakan kebijaksanaan PBB. (Saparin, 1986 : 209).

Pembangunan pedesaan secara nasional tidak mungkin disamaratakan, mengingat pedesaan di Indonesia mempunyai ciri-ciri : umumnya kepadatan penduduk tidak terlalu tinggi, tingkat pendidikan rendah, keadaan alam dan geografisnya berbeda, kegiatan usaha utama adalah pertanian (termasuk kehutanan, peternakan, perikanan), tingkat pendapatan masyarakat relatif rendah, masyarakat relatif homogen dalam hal mata pencaharian, agama dan adat istiadat. (Hamim, 2003 : 74).

Sejalan pula dengan upaya pemberdayaan masyarakat maka pelaksanaan pembangunan di pedesaan disesuaikan pula dengan historis desa, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, nilai sosial budaya dan nilai agamanya yang merupakan faktor-faktor lingkungan yang ikut berpengaruh. (Hamim, 2003 : 75)

Sebagai kegiatan operasional, program-program kegiatan pembangunan direalisasikan dalam bentuk proyek-proyek yang ditetapkan sesuai dengan relevansinya. Proyek-proyek pembangunan masyarakat pedesaan adalah suatu proyek khusus sebagai bentuk realisasi pembangunan pedesaan. Sedangkan guna menunjang pelaksanaan program-program/ proyek-proyek pembangunan yang bersangkutan diperlukan adanya dana yang dicadangkan dalam anggaran pembangunan bagi masing-masing proyek yang sudah ditetapkan.

Langkah-langkah dalam pembangunan desa adalah :

1. Penetapan jenis-jenis program kegiatan dan proyek-proyek pembangunan pedesaan.

Pelaksanaan daripada program pembangunan masyarakat pedesaan terdiri dari berbagai jenis program kegiatan proyek antara lain mengikuti :

- a. Proyek-proyek prasarana.
- b. Bantuan tenaga ahli, modal/ dana dan teknologi.
- c. Program gerakan kemasyarakatan antara lain : KB, PKK, Bimas/ Inmas, Panca Usaha dan lain-lain.
- d. Program organisasi kemasyarakatan antara lain : RT/RW, BUUD/ KUUD, Koperasi Tani dan Nelayan.

2. Penetapan strategi kebijaksanaan pembangunan masyarakat pedesaan.

3. Perencanaan.

4. Penyediaan dana.

5. Pengawasan pembangunan desa.

6. Evaluasi.

(Saparin, 1986 : 214-217).

Pembangunan masyarakat desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. (Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Riau, 2000 : 36)

Visi pembangunan masyarakat desa adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek atau pelaksana utama dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan menuju terwujudnya kemandirian masyarakat.



Sedangkan misi pembangunan masyarakat desa adalah meningkatkan ketahanan masyarakat desa, yang meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, melalui pengembangan kemampuan kemandirian dan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan. (Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Riau, 2000 : 36)

Tujuan pembangunan masyarakat desa :

1. Tujuan Umum

Meningkatkan taraf penghidupan dan kehidupan rakyat di desa-desa yang berarti menciptakan situasi dan kondisi, kekuatan dan kemampuan dalam satu tingkat yang lebih kuat dan nyata untuk tahap-tahap pembangunan selanjutnya dan mewujudkan desa swasembada yang berketahanan di segala bidang.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengadakan perubahan dan pembaharuan secara terarah terhadap kondisi kehidupan masyarakat desa.
- b. Mengembangkan wilayah desa sebagai satuan potensi sosial, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan menuju terciptanya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan.
- c. Meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat desa guna terwujudnya daya cipta dan karya masyarakat desa dalam pembangunan.
- d. Memupuk dan membina kestabilan kehidupan masyarakat desa sebagai landasan penciptaan kestabilan nasional.
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pedesaan, agar mampu mengelola proses secara mandiri.

(Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Riau, 2000 : 36-37)

Adapun asas pembangunan masyarakat desa ialah :

1. Swadaya Masyarakat
2. Gotong royong/ kekeluargaan
3. Berorientasi kepada kepentingan rakyat
4. Keseimbangan antara pembangunan sosial dan ekonomi.

(Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Riau, 2000 : 37)

Permasalahan utama pembangunan pedesaan adalah :

1. Keterbatasan akses masyarakat pedesaan terhadap input produksi dan kesempatan berusaha serta lemahnya struktur kegiatan sosial ekonomi yang masih berwatak subsistem.
2. Kemiskinan
3. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia pedesaan.
4. Kurang optimalnya pemanfaatan sumberdaya kehidupan pedesaan, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pelestarian lingkungan hidup.
5. Belum memadainya kelembagaan yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal, rendahnya kemampuan manajemen dan terbatasnya sarana kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat desa.
6. Kurangnya kepahaman masyarakat terhadap teknologi dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Dominasi pemerintah dalam segala aspek kehidupan masyarakat pedesaan. Terbatasnya prasarana dan sarana pada kondisi geografis wilayah yang relatif sulit dan masih besarnya jumlah desa terpencil.

(Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Riau, 2000 : 38)

Sasaran pembangunan masyarakat desa adalah :

1. Bidang mental spiritual/ sosial kultural meliputi mental, agama, pendidikan/ skill, Kebudayaan nasional, kesehatan, papan/ perumahan.
2. Bidang fisik materil/ekonomi meliputi peningkatan produksi, pengusahaan produksi dan pemasaran, prasarana ekonomi, perkreditan desa, lapangan kerja.
3. Bidang pemerintahan dan ketertiban meliputi penyempurnaan dan mendinamisir pemerintahan desa sehingga mampu melaksanakan pembangunan masyarakat desa, menciptakan kondisi di desa sehingga pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, (Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Riau, 2000 : 40).

#### **D. Partisipasi Masyarakat**

Menurut Siagian (1986 : 24) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diartikan sebagai tindakan dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan dengan usaha menyumbangkan hal-hal yang bersifat material maupun spiritual. Selanjutnya partisipasi menurut Mubyarto dalam Ndraha(1985 : 102) mengatakan bahwa partisipasi adalah kesediaan untuk membantu berhasinya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan diri sendiri.

Deangan demikian dapat dikatakan bahwa setiap desa di tanah air kita telah memiliki sifat otonomi dalam arti mengatur atau mengurus rumah tangganya sendiri dengan kekuatan atau kemampuannya sendiri. Desa yang memiliki potensi, apabila tahap demi tahap bisa digali, diolah dan dimanfaatkan maka akan nampak klasifikasi tingkat perkembangan desa yang terus menerus meningkat sesuai dengan yang telah ditetapkan tiga klasifikasi tingkat perkembangan desa yaitu : desa swadaya, desa swakarya dan desa swasembada.

Sesuai dengan prinsip pembangunan yang partisipatif, bahwa pembangunan harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, maka pembangunan tersebut mestilah dilaksanakan berdasarkan imbangannya yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Berkaitan dengan kebijakan pembangunan pedesaan yang mandiri, Korten dalam Hamim dan Adnan (2005 : 73) menyatakan pembangunan pedesaan harus menekankan kepada :

1. Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri;
2. Fokus utamanya adalah meningkatkan untuk mengelola dan memobilisasi sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka;
3. Pendekatan ini mentoleransi variasi lokal, dan karenanya memiliki sifat amat fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal;
4. Dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses *social learning*, yang terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas, mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri pada sikap saling belajar;
5. Proses pembentukan jaringan (*networking*) antara birokrat dan lembaga swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri, merupakan bagian integral dari pendekatan ini. Melalui proses *networking* ini diharapkan terjadi simbiose antara struktur-struktur pembangunan ditingkat lokal.

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam partisipasi mengandung pengertian tentang keterlibatan, prakarsa, swadaya, serta tanggung jawab

masyarakat di dalam mendukung program kebijakan pemerintah yang pada hakekatnya bertujuan untuk kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan modal dasar yang cukup penting untuk dapat mendukung pembangunan desa, oleh sebab itu partisipasi masyarakat harus ditumbuhkan kembangkan secara berkesinambungan. Kepala Desa sebagai pimpinan organisasi pemerintahan desa harus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat desa, termasuk partisipasi di dalam pembangunan desa.

#### **E. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Bidang Rumah Layak Huni (PRSLH)**

Organisasi Masyarakat Setempat adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berfungsi sebagai pelaksana dalam program Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH).

##### **1. Kriteria Organisasi Masyarakat Setempat**

- Diusulkan oleh masyarakat atau pengusulan/ pencalonan disetujui oleh masyarakat
- Sehat secara rohani dan tidak mempunyai hambatan jasmani (yang mengalami kesulitan berat) dalam melakukan tugas sehari-hari
- Minimal dapat memahami pesan tertulis dan mengungkapkan pesan/ catatan dengan tulisan
- Tinggal dalam kawasan yang sama dengan masyarakat yang akan didampingi
- Berdedikasi tinggi, bertanggung jawab dan mampu berkomunikasi yang baik dengan masyarakat

##### **2. Peran Organisasi Masyarakat Setempat**

- OMS adalah anggota masyarakat biasa yang bertanggungjawab terhadap kesinambungan pelaksanaan program pembangunan serta menjaga kualitas pembangunannya agar terlaksana dengan baik, benar dan memenuhi standar.
- OMS adalah penggerak masyarakatnya sendiri dalam proses kemandirian penyelenggaraan pembangunan perumahan dan lingkungan di tengah masyarakat.
- Sebagai pelaksana masyarakat, OMS dapat berfungsi sebagai penggerak yang dapat secara luas mendorong, mengajak dan mempercepat proses pembangunan di lingkungan/ wilayah di mana dia berada.
- Dapat berfungsi sebagai konsultan pembangunan yang mendorong terciptanya inovasi dan kreatifitas dimasyarakat sehingga memperkaya khasanah dan wawasan pembangunan sehingga harkat, martabat dan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan bias terangkat.
- Dapat berfungsi sebagai kader pembangunan dengan menciptakan pembaharuan, merubah paradigm masyarakat menjadi mau, tau dan berperan aktif dalam pembangunan lingkungan dimana dia bertempat tinggal.

### 3. Lingkup Tugas Organisasi Masyarakat Setempat

- Melakukan koordinasi ke dalam, artinya mendalami apa kemauan masyarakat yang didampinginya, kemudian mencari jalan penyelesaian yang disesuaikan dengan kondisi, rencana dan program yang ada misalnya program nasional, regional.
- Melakukan koordinasi dengan institusi-institusi terkait, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

- Melakukan pendampingan terhadap masyarakat terutama dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas lingkungannya secara terus-menerus dan berkesinambungan.

#### 4. Tugas Organisasi Masyarakat Setempat dalam Pemberdayaan

- Menyadarkan bahwa setiap manusia punya harkat dan martabat yang sama untuk hidup layak dan salah satunya dapat ditempuh melalui peningkatan lingkungan permukiman yang sehat.
- Menggugah kesadaran dan kemauan masyarakat untuk peduli terhadap kualitas lingkungan tempat tinggalnya serta mengambil peran aktif dalam program penataan dan peningkatan prasarana lingkungan permukiman.
- Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menjaga dan memelihara kualitas infrastruktur jalan dan lingkungannya secara mandiri dan bertanggung jawab.
- Tetap menjaga dan mendorong keinginan masyarakat untuk terus maju dan berkembang, tidak hanya merasa cukup dan puas pada kondisi sesaat.

#### 5. Tugas dan Tanggung Jawab OMS untuk PRSLH 2009

- Membantu PPTK dalam pelaksanaan kegiatan di masyarakat.
- Membuat Dokumen Teknis (pembuatan gambar rencana, pengukuran serta penyusunan Rencana Anggaran Biaya) sebagaimana format yang telah ditetapkan.
- Melakukan pengawasan terhadap mutu dan volume pelaksanaan kegiatan.
- Membuat laporan harian dan mingguan yang disampaikan kepada PPTK melalui tingkat Kab./ Kota setelah disetujui Korlap.

- Menjadi narasumber, mediator, pengarah sekaligus menjadi motivator bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur perumahan agar tercapai tujuan dan sasaran.
- Membuat proposal pengajuan dana serta mengontrol penggunaan dana di lapangan.
- Membuat Rencana Pembangunan Dana (RPD) serta Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemerintah dan masyarakat.
- Menjadi inisiator dan fasilitator dalam terselenggaranya Musyawarah Desa (Musdes) sebagai salah satu bentuk kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat.

Dalam ajaran agama Islam banyak ayat Al-Qur'an dan hadist yang menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab manusia di muka bumi ini, antara lain :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۙ ﴿۳۰﴾

Artinya :

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Al-Baqarah:30)



Antara anugrah Allah kepada manusia ialah pemilihan manusia menjadi khalifah atau wakilnya di bumi. Dengan dipilihnya manusia menjadi khalifah, ia mempunyai kewajiban yang harus ditegakkan diantaranya kewajiban menegakan kebenaran, kebaikan, mewujudkan perdamaian, menghapus kemungkaran serta penyelewengan dan penyimpangan dari jalan Allah. Kewajiban-kewajiban tersebut akan dimintai tanggung jawabnya kelak oleh Allah. Apabila pengakuan terhadap kenyataan dan hakikat wujudnya hari pembalasan telah dibuat maka tugas yang diwajibkan ke atas dirinya perlu dilaksanakan. Dikalangan makhluk ciptaan Allah, manusia telah dipilih oleh Allah untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut.

Selanjutnya banyak hadits yang menjelaskan, bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah tentang kepemimpinannya. Hadits diantaranya dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan No. 1199 sebagai berikut :

أ, عَنْهُمَا	عليه :
فالأمر, رعيته	عندهم وهو
عندهم وهو مسؤول بيته أهل	راعية
عندهم مسئوله	عنه, وهو سيده
	بعلمها بيت وهي
	( رعيته )

Artinya: :

Rosulullah SAW. bersabda : "Kalian semuanya pemimpin (pemelihara) dan bertanggungjawab terhadap rakyatnya, seorang Raja memelihara rakyat dan akan ditanya tentang pemeliharaannya, seorang suami memimpin keluarganya dan akan ditanya tentang pimpinannya, seorang ibu memimpin rumah suaminya dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang pimpinannya, seorang hamba memelihara harta milik majikannya dann akan ditanya tentang pemeliharaannya.

Camkanlah bahwa kalian semua memelihara dan akan dituntut tentang pemeliharaannya". (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadits tersebut kita mengetahui, bahwa setiap orang yang menjadi pemimpin pasti akan dimintai suatu pertanggungjawabannya oleh Allah, sesuai tingkat kepemimpinannya itu.

1. Para tokoh masyarakat dan penguasa adalah pemimpin dalam suatu Negara atau organisasi. Mereka akan ditanya “apakah mereka sudah mendidik masyarakatnya menjadi orang yang beriman dan bertaqwa?”
2. Suami dalam rumah tangga adalah pemimpin dalam keluarganya dan semua suami akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang istri dan anaknya. “apakah mereka sudah berusaha mendidik mereka menjadi orang-orang yang sholeh atau belum?”
3. Istri-istri yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga suaminya. mereka semua juga akan dimintai pertanggungjawabannya. “ Apakah mereka sudah menjalankan tugasnya sebagai istri yang sholehah, ibu rumah tangga yang baik atau belum?”
4. Para buruh pembantu rumah tangga dan pegawai akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. “ Apakah mereka menjalankan tugasnya dengan baik atau belum?”

Pada intinya apa yang dikemukakan dalam hadits tersebut hanya sebagai contoh belaka, sebab permulaan hadits tersebut menegaskan bahawa setiap orang menjadi pemimpin dan bertanggung jawab atas apa-apa yang diperbuatnya.

## 6. Sistematika Laporan Organisasi Masyarakat Setempat

- Pendahuluan

- Latar Belakang (kenapa desa anda perlu mendapatkan bantuan infrastruktur pembangunan)
- Gambaran Umum Desa
- Faktor-faktor Pendukung dan Kendala
- Lampiran-lampiran terdiri dari
  - Laporan harian
  - Laporan mingguan
  - Kemajuan fisik
  - Kemajuan keuangan
  - Laporan masalah di tingkat desa

#### **F. Konsep Operasional**

Untuk mempermudah penganalisaan dalam penelitian ini, maka diuraikan konsep operasional sebagai berikut :

1. Tugas dan tanggung jawab adalah, sesuatu yang wajib dikerjakan dan ditentukan untuk dilakukan atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang dan harus siap menerima kewajiban atau tugas yang telah ditetapkan.
2. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) adalah, suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berfungsi sebagai pelaksana dalam program Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (PRSLH) yang dibentuk secara demokratis melalui renbug warga dan dilakukan secara transparan.

3. Rumah Layak Huni adalah, bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang aman untuk ditempati dan tidak membahayakan penghuninya juga sebagai sarana pembinaan keluarga.
4. Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) adalah, bertanggung jawab terhadap kesinambungan pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni serta menjaga kualitas pembangunannya agar terlaksana dengan baik, benar dan memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan indikatornya adalah:
  - a. Mengidentifikasi prioritas pembangunan yang ada di desa, yaitu menentukan sarana dan prasarana yang perlu segera dibangun di desa berdasarkan data serta aspirasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa.
  - b. Mengidentifikasi dan memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di desa secara komprehensif, berlaku adil dan tidak diskriminatif, yaitu mendata jumlah keluarga miskin yang berhak menerima bantuan rumah layak huni secara menyeluruh dan adil.
  - c. Menyusun rencana kegiatan, yaitu menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan serta menyusun anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan rumah layak huni.
  - d. Memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong-royong yaitu, mendorong dan menggerakkan partisipasi swadaya masyarakat dengan cara mengumpulkan dan menyerap aspirasi masyarakat serta melibatkan warga saat pengambilan keputusan dalam rapat atau musyawarah perencanaan pembangunan desa.

#### **G. Indikator Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menguraikan indikator-indikator tentang tugas dan tanggung jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) adalah:

1. Mengidentifikasi prioritas pembangunan desa
2. Mengidentifikasi/ memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di desa
3. Menyusun Rencana Kegiatan
4. Memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong-royong

#### **H. Teknik Pengukuran**

Pengukuran pada setiap indikator variabel penelitian ini diuraikan dengan kriteria berikut :

1. Mengidentifikasi prioritas pembangunan desa, dikategorikan :

Baik : Apabila pengurus OMS ikut serta secara aktif untuk mengikuti rapat/ musyawarah rencana pembangunan desa dan menentukan sarana/ prasarana yang harus segera direalisasikan pembangunannya.

Kurang Baik : Apabila pengurus OMS kurang aktif mengikuti musyawarah rencana pembangunan desa dan belum sepenuhnya dapat menentukan sarana/ prasarana desa yang harus segera direalisasikan pembangunannya.

Tidak Baik : Apabila pengurus OMS tidak pernah mengikuti musyawarah rencana pembangunan desa dan tidak mampu menentukan sarana/ prasarana yang harus segera direalisasikan pembangunannya.

2. Mengidentifikasi/ memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di desa, dikategorikan :

Baik : Apabila pengurus OMS ikut serta secara aktif untuk mendata jumlah keluarga miskin secara komprehensif, adil dan tanpa perlakuan diskriminatif.

Kurang Baik : Apabila pengurus OMS kurang ikut serta untuk mendata jumlah keluarga miskin secara komprehensif, adil dan tanpa perlakuan diskriminatif.

Tidak Baik : Apabila pengurus OMS tidak pernah melakukan pendataan jumlah keluarga miskin di desa.

3. Menyusun rencana kegiatan, dikategorikan :

Baik : Apabila pengurus OMS ikut serta secara aktif untuk menyusun rencana kerja/ kegiatan pembangunan desa, dan menyusun anggaran yang dibutuhkan.

Kurang Baik : Apabila pengurus OMS kurang ikut serta untuk menyusun rencana kerja/ kegiatan pembangunan desa, dan kurang mampu menyusun anggaran yang dibutuhkan.

Tidak Baik : Apabila pengurus OMS tidak pernah melakukan penyusunan rencana kerja/ kegiatan pembangunan desa dan anggaran yang dibutuhkan.

4. Memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong-royong, dikategorikan :

Baik : Apabila pengurus OMS selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat gagasan/ saran dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai pembangunan desa.

Kurang Baik : Apabila pengurus OMS jarang memberikan kesempatan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan/ saran dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai pembangunan desa.

Tidak Baik : Apabila pengurus OMS tidak pernah memberikan kesempatan kepada masyarakat gagasan/ saran dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai pembangunan desa.

## **I. Hipotesis**

Bertitik tolak dari uraian tugas dan tanggung jawab OMS, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang kebenarannya akan dibuktikan lebih lanjut. Hipotesis tersebut adalah : **“Diduga Tugas dan Tanggung Jawab OMS dalam Pengadaan Rumah Layak Huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Kurang Baik”**.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Mengacu pada rumusan tujuan penelitian maka data dan informasi yang dikumpulkan melalui survei akan dijadikan dasar untuk mendiskripsikan sehingga tipe penelitian ini diklasifikasikan ke dalam penelitian survei deskriptif.

Menurut Nazir (1999 : 63 ), metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu kelompok, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara hubungan antara fenomena yang dihadapi.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Pemilihan lokasi penelitian ini adalah dengan pertimbangan bahwa desa merupakan salah satu penerima bantuan Rumah Sederhana Layak Huni dari pemerintah daerah, namun terlihat belum diterima secara adil dan merata oleh masyarakat miskin yang berhak di desa tersebut.

#### **C. Populasi dan sampel**

##### **1. Populasi**



Populasi penelitian ini adalah seluruh warga masyarakat yang didata sebagai penerima bantuan Rumah Sederhana Layak Huni yang ada di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2009, yakni sebanyak 110 Kepala Keluarga (KK), 1 orang Kepala Desa, 3 orang Anggota Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dan 2 orang Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) didesa tersebut.

## 2. Sampel

Adapun sampel yang ditentukan dalam pelaksanaan penelitian ini dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel III.1**

### **Distribusi Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian**

NO	Sub Populasi	Jumlah	
		Populasi	Sampel
1.	Kepala Desa	1	1
2.	Anggota OMS	3	3
3.	Anggota TPM	2	2
4.	Kepala Keluarga Penerima Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni	110	20
<b>Jumlah</b>		<b>116</b>	<b>26</b>

**Sumber:** Kantor Kepala Desa Koto Tinggi 2010

## **D. Teknik Penarikan Sampel**

Untuk penetapan sampel dari populasi yang ada penulis menggunakan 2 teknik, yaitu untuk Kepala Desa, Anggota OMS dan TPM diambil seluruhnya dari semua populasi dengan menggunakan teknik sensus. Sementara untuk Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan Rumah Sederhana Layak Huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah adalah menggunakan teknik *simple random sampling*, dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. (Sugiyono : 2011. 93).

Untuk menentukan jumlah sampel penulis mengambil metode yang dikemukakan oleh Suharsimi dan Arikunto (2002) yang mengatakan cara menentukan sampel adalah bila subyek kurang dari 100 orang lebih baik diambil seluruhnya dan apabila lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25%.

Dalam penelitian ini yang mana sampel diambil sebanyak 20 orang dari populasi 110 orang. Ukuran sampel merupakan besarnya sampel yang akan diteliti, dinyatakan dalam prosentase kemudian dihitung besar nilainya. Untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi, para ahli mengemukakan bermacam-macam cara. Penulis mengambil ukuran sampel berdasarkan pendapat Slovin (Husein Umar, 1997. 107) yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

$N$  = Ukuran populasi

$n$  = Jumlah sampel

$e^2$  = Porsentase kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan

## **E. Jenis dan Sumber Data**

1. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari responden penelitian ini antara lain tentang: data hasil kuisioner berupa pendapat responden tentang fungsi pengawasan OMS dalam pembangunan pengadaan Rumah Sederhana Layak Huni; dan data hasil wawancara dengan responden untuk memperjelas dan hasil kuisioner tersebut.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperlukan guna memperjelas permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari instansi terkait yakni pemerintahan Desa dan OMS, mengenai data profil desa dan organisasi masyarakat setempat.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

1. Angket (kuisioner) adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan angket (daftar pertanyaan) kepada para responden sesuai variabel/ indikator penelitian.
2. Wawancara (Interview) adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung kepada responden, melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan bertujuan untuk memperjelas hasil yang diperoleh melalui kuisioner.
3. Observasi yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung kepada obyek penelitian untuk melihat keadaan secara nyata.

#### **G. Analisa Data**

Setelah data atau bahan-bahan yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder telah berhasil dikumpulkan, kemudian dipisahkan atau dikelompokkan sesuai dengan keperluan dan kegunaan mendiskripsikan keseluruhan data yang diperoleh, serta melakukan analisa secara kualitatif untuk kemudian dapat menarik suatu kesimpulan.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **A. Desa Koto Tinggi**

Kabupaten Rokan Hulu merupakan suatu wilayah di Propinsi Riau yang telah mengalami perkembangan cukup pesat terutama setelah dilakukan pemekaran, baik perkembangan di bidang sosial dan perekonomian masyarakat maupun perkembangan di bidang organisasi pemerintahan daerah, hingga pada tingkat kecamatan dan kelurahan/ desa.

Desa Koto Tinggi adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Letak geografis desa ini dapat digambarkan dengan batas-batas desa sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pasir Pengarayan dan Desa Pematang Berangan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suka Maju.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rambah Tengah Hilir dan Desa Pasir Baru.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rambah Tengah Barat.

Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah berada pada jarak lebih kurang 4 kilo meter dari ibukota kabupaten, dan lebih kurang 3 kilometer dari ibukota kecamatan dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam jalan darat. Penduduk desa pada data akhir tahun 2008 berjumlah 5.274 jiwa yang terdiri dari 2.741 penduduk laki-laki dan 2.533 perempuan, dan 1.540 Kepala Keluarga (KK), yang berada pada wilayah desa seluas 5 kilo meter persegi. Untuk lebih jelasnya tentang

Data Wilayah Administrasi Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan jumlah penduduk dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel IV.1 Data Wilayah Administrasi Desa Koto Tinggi**

NO	DESA	LUAS WILAYAH (KM)	JARAK KE KABUPATEN/ KECAMATAN (KM)	WAKTU TEMPUH (Jam)
1	DESA KOTO TINGGI	5 (km)	Ke Kabupaten 4 (km) Ke Kecamatan 3 (km)	- 1 Jam - 1 Jam

**Sumber** : Kantor Kepala Desa Koto Tinggi

**Tabel IV.2 Jumlah Populasi Penduduk Desa Koto Tinggi**

NO	INDIKATOR	JUMLAH	
		TAHUN 2007	TAHUN 2008
1	Jumlah Penduduk	5,171	5,274
2	Jumlah Penduduk Laki-laki	2,687	2,741
3	Jumlah Penduduk Perempuan	2,484	2,533
4	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	1,467	1,540
5	Jumlah Rumah Tangga Miskin	385	422

**Sumber** : Kantor Kepala Desa Koto Tinggi

Penduduk di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah sebagian besar adalah suku Melayu, namun juga terdapat penduduk dari suku lainnya, seperti suku Jawa, Batak, Minangkabau dan sebagainya. Pada umumnya mata pencaharian penduduk adalah bertani, karena keadaan tanah

wilayah desa yang cukup subur untuk bercocok tanam, seperti tanaman karet, perkebunan kelapa sawit, kelapa dan berbagai jenis palawija.

Keadaan prasarana pendidikan formal di Desa Koto Tinggi cukup memadai, yang mana terdapat 5 buah Sekolah Dasar (SD), 2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 3 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), 4 Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), 3 Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), 1Taman Kanak-kanak (TK) dan 3 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel IV.3 Prasarana Pendidikan**

NO	INDIKATOR	JUMLAH	
		TAHUN 2007	TAHUN 2008
1	SD / Sederajat	5	5
2	SLTP / Sederajat	2	2
3	SLTA / Sederajat	3	3
4	Lembaga Pendidikan Agama		
	a. Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)	4	4
	b. Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA)	3	3
	Lembaga Pendidikan Anak		
5	a. Taman Kanak-kanak (TK)		
	b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1	1
		3	3

**Sumber** : Kantor Kepala Desa Koto Tinggi

Adapun prasarana kesehatan bagi masyarakat di Desa Koto Tinggi belum cukup memadai. Prasarana kesehatan yang tersedia hanya Posyandu sebanyak 8 unit yang tersebar di wilayah desa, sedangkan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) belum tersedia.

**B. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu**

Pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) pada dasarnya dimaksudkan untuk mensukseskan program pemberdayaan dan pembangunan dipedesaan dengan menghimpun segala potensi dan partisipasi masyarakat desa. Selain itu melalui OMS tersebut masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab yang lebih besar dalam menentukan dan merumuskan kebutuhan dasar akan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan dan menjadi prioritas bagi masyarakat desa. Dengan demikian Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) berperan penting untuk terlaksananya program pembangunan di desa.

Adapun tugas dan tanggung jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran 1 Peraturan Gubernur Riau Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman dengan pola Pemberdayaan Masyarakat tahun 2008 adalah :

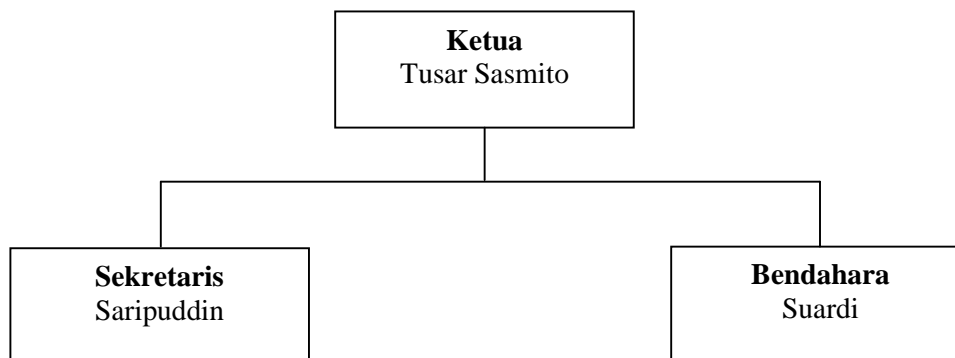
1. Mengidentifikasi prioritas pembangunan yang ada di desa
2. Mengidentifikasi/ memetakan keadaan keluarga miskin di desa secara komprehensif, berlaku adil dan tidak diskriminatif

3. Menyusun Rencana Kegiatan, Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan bekerja sama dengan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

4. Memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong-royong

Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dibentuk secara demokratis melalui renbug warga dan dilakukan secara transparan, yang diteptapkan dan di sahkan oleh Kepala Desa Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Koto Tinggi Nomor 05/ SK/ V/ 2008 tentang Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Koto Tinggi. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Koto Tinggi tersebut ditetapkan struktur organisasi pengurus sebagai berikut :

**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)**  
**Desa Koto Tinggi**



**Sumber :** Surat Keputusan Kepala Desa Koto Tinggi Nomor 05/ SK/ V/ 2008

Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan program pembangunan pedesaan. Adapaun salah satu kegiatan OMS di Desa Koto Tinggi ialah menyelenggarakan program pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH).



Program pembangunan rumah sederhana layak huni yang dilaksanakan seperti yang di jelaskan dalam lampiran 1 Peraturan Gubernur Riau Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2009, merupakan program Pembangunan yang berbasis pada pendekatan pemberdayaan serta partisipasi masyarakat melalui :

1. Pembangunan yang berkualitas, artinya semua infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standar teknik yang telah ditetapkan
2. Keberpihakan pada kaum miskin, orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil diutamakan bagi penduduk miskin
3. Otonomi dan desentralisasi masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya
4. Partisipatif, masyarakat terlihat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan dengan semangat gotong-royong

Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) merupakan lembaga kemasyarakatan, dengan persyaratan kepengurusan sebagai berikut :

- a. Pengurus OMS mempunyai kemampuan baca tulis
- b. Warga desa setempat, terutama yang dikenal dan dikenal sebagian besar warga desa
- c. Mempunyai kepedulian terhadap pembangunan desa
- d. Mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan tugasnya dan memahami kondisi desa

Ketua dan bendahara OMS dalam satu paket pemilihan dan dituangkan

## BAB V

### HASIL DAN ANALISA DATA

#### A. Identitas Responden

Responden penelitian secara keseluruhan berjumlah 26 orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 3 Orang Pengurus OMS, 2 Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan 20 orang Kepala Keluarga (KK) warga masyarakat penerima bantuan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah. Untuk lebih jelasnya identitas responden tersebut disajikan sebagai berikut :

**Tabel V.1. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kepala Desa, Pengurus OMS dan TPM**

Tingkat Pendidikan		Responden						Jumlah	
		Kepala Desa		Pengurus OMS		Tenaga Pendamping Masyarakat			
jmlh	%	jmlh	%	jmlh	%	jmlh	%		
1	SMA	1	100,0	2	66,7	1	50,0	4	66,7
2	D-3	-	-	1	33,3	1	50,0	2	33,3
3	S.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1	100,0	3	100,0	2	100,0	6	100,0

*Sumber : Data olahan hasil penelitian*

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa identitas responden menurut tingkat pendidikan dari Kepala Desa, Pengurus OMS, dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) adalah 4 orang atau 66,7% berpendidikan SMA, dan 2 orang atau 33,3% berpendidikan Diploma (D3).

Selanjutnya identitas responden yang merupakan Kepala Desa, Pengurus OMS dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) berdasarkan tingkat umur adalah seperti terdapat pada tabel berikut :

**Tabel V.2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur**

Tingkat  Umur  (tahun)		Responden						Jumlah	
		Kepala  Desa		Pengurus  OMS		Tenaga  Pendamping  Masyarakat			
						jmlh	%		
1	30-39	-	-	1	33,3	2	100,0	3	50,0
2	40-49	1	100,0	2	66,7	-	-	3	50,0
Jumlah		1	100,0	3	100,0	2	100,0	6	100,0

*Sumber : Data olahan hasil penelitian*

Berdasarkan tabel di atas identitas responden menurut tingkat umur dari Kepala Desa, Pengurus OMS dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) adalah sebanyak 3 orang 50,0% dengan tingkat umur 30-39 tahun, dan 3 orang atau 50,0% dengan tingkat umur 40-49 tahun.

Adapun identitas responden yang merupakan warga masyarakat penerima bantuan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah menurut tingkat umur adalah sebagai berikut :

**Tabel V.3. Identitas Responden Masyarakat Penerima Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) Menurut Tingkat Umur**

Tingkat Umur (tahun)	Responden	
	Jumlah	%

1	30-39	4	20,0
2	40-49	6	30,0
3	50-59	10	50,0
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100,0</b>

**Sumber :** Data olahan hasil penelitian

Berdasarkan tabel di atas identitas responden menurut tingkat umur dari masyarakat penerima bantuan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah adalah, sebanyak 4 orang atau 20,0% dengan tingkat umur 30-39 tahun, 6 orang atau 30,0% dengan tingkat umur 40-49 tahun dan 10 orang atau 50,0% dengan tingkat umur 50-59 tahun.

Kemudian identitas responden yang merupakan warga masyarakat penerima bantuan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah menurut pekerjaan/ mata pencaharian adalah sebagai berikut :

**Tabel V.4. Identitas Responden Masyarakat Penerima Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) Menurut Pekerjaan/ Mata Pencaharian**

<b>Pekerjaan/ Mata Pencaharian</b>		<b>Responden</b>	
		<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
1	Buruh	5	25,0
2	Petani	15	75,0
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100,0</b>

**Sumber :** Data olahan hasil penelitian

Berdasarkan tabel di atas identitas responden menurut pekerjaan/ mata pencaharian masyarakat penerima bantuan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) di Desa Koto Tinggi

Kecamatan Rambah adalah sebanyak 5 orang atau 25,0% dengan pekerjaan/ mata pencaharian buruh, dan 15 orang atau 75,0% dengan pekerjaan/ mata pencaharian petani.

**B. Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu**

Pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa merupakan program dan kebijakan yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional, karena kesuksesan pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa menjadi indikator yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Terlebih lagi sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di wilayah pedesaan, maka pemberdayaan dan pembangunan masyarakat yang ada di pedesaan harus menjadi bagian penting dalam rangka pembangunan nasional tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan dan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah, selain ketersediaan berbagai sumberdaya, juga ditentukan oleh adanya partisipatif aktif masyarakat. Partisipatif aktif masyarakat selain dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan, juga menjamin agar program yang dilaksanakan tepat guna dan tepat sasaran.

Adapun salah satu bentuk partisipasi masyarakat dengan upaya pemberdayaan dan pembangunan desa adalah diwujudkan dalam pengelolaan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS). Sebagai suatu organisasi kemasyarakatan di tingkat desa, OMS sesuai dengan tugas dan

tanggung jawabnya berupaya untuk berperan aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagaimana yang terdapat di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) telah mengambil bagian penting dalam kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa. Adapaun salah satu kegiatan yang dilaksanakan OMS di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah ialah pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin di desa tersebut sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang membantu pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa, OMS memiliki tugas dan tanggung jawab dalam : mengidentifikasi prioritas pembangunan yang ada di desa; mengidentifikasi/ memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di desa secara komprehensif, berlaku adil dan tidak diskriminatif; menyusun Rencana Kegiatan, Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan bekerja sama dengan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM); dan memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong-royong.

Untuk mengetahui sejauhmana tugas dan tanggung jawab yang telah dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah dalam kegiatan pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) bagi masyarakat desa tersebut, maka penulis menganalisis hal itu berdasarkan kuisisioner dan wawancara yang diuraikan sebagai berikut :

### B.1. Mengidentifikasi prioritas pembangunan yang ada di Desa

Mengidentifikasi prioritas pembangunan yang ada di Desa adalah salah satu tugas OMS yang dimaksudkan untuk menentukan sarana/ prasarana yang perlu segera dibangun di desa berdasarkan data serta aspirasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dengan melakukan identifikasi yang tepat terhadap sarana dan prasarana yang perlu mendapat prioritas, maka diharapkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direalisasikan tepat guna dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Untuk mengetahui dari fungsi pengawasan OMS dalam mengidentifikasi prioritas pembangunan di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dapat dilihat dari analisis dan tanggapan responden sebagai berikut :

**Tabel V.5 Tanggapan Responden Tentang OMS dalam Mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan Desa**

No		Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Ikut	10	50,0 %
2	Kurang tau	7	35,0 %
3	Tidak tau	3	15,0 %
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100 %</b>

*Suber : Data Hasil Penelitian*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata 10 responden atau 50,0% menyatakan OMS ikut dalam Mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden :

- *OMS selalu mengikuti rapat dengan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.*
- *Selaku tim pengurus dan penggerak dalam pembangunan pemukiman masyarakat, OMS harus berperan aktif.*
- *OMS wajib hadir pada setiap rapat diadakan untuk perencanaan pembangunan di desa ini.*

- *OMS harus hadir disetiap rapat diadakan, karna ini menyangkut tentang tanggung jawabnya.*
- *Anggota OMS adalah sebagai penanggung jawab dalam pembangunan pemukiman masyarakat miskin.*
- *Setiap musyawarah OMS selalu menghadiri nya, dalam perencanaan pembangunan pemukiman bagi masyarakat miskin.*

Sementara itu rata-rata 7 responden atau 35,0% menyatakan OMS kurang tau dalam mengikuti musyawarah rencana pembangunan di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah.

Adapun penjelasan responden adalah :

- *Karna saya kurang tau dengan anggota OMS yang ditunjuk.*
- *Saya kurang tau, karna saya tidak bisa hadir.*
- *Saya tidak terlalu mengetahui, karna sewaktu rapat saya ada kepentingan lain.*
- *Dikarnakan saya kurang aktif dalam mengikuti rapat.*
- *Saya agak kurang tau, karna saya ada halangan untuk hadir.*
- *Karna saya jarang sekali mengikuti rapat.*

Kemudian rata-rata 3 responden atau 15,0% yang menyatakan tidak tau apakah OMS mengikuti musyawarah rencana pembangunan di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah. Dengan penjelasan responden sebagai berikut:

- *Saya tidak tau apakah OMS selalu mengikuti rapat atau tidak.*
- *Karna saya tidak ikut dalam mengikuti rapat yang diadakan oleh OMS.*

Sehubungan dengan keikutsertaan OMS dalam Mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tersebut, menurut Kepala Desa bahwa pengurus OMS di daerah setempat telah dapat mengikuti dengan baik, melalui kegiatan musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa.

Lebih lanjut menurut Pengurus OMS di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tersebut, pada dasarnya OMS berupaya untuk menghadiri setiap musyawarah rencana pembangunan yang



dilakukan di tingkat desa sehingga OMS dapat mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pembangunan desa.

Kemudian menurut Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah juga menjelaskan bahwa pengurus OMS telah Mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan di desa tersebut dengan baik melalui gagasan dan saran yang disampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan yang dilaksanakan. Dalam hal ini TPM berupaya membantu OMS dalam mengidentifikasi usulan kegiatan yang disampaikan masyarakat desa.

Sementara itu dari observasi yang dilakukan dapat dilihat bahwa pada dasarnya OMS di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah cukup aktif dalam mengikuti musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa untuk mengetahui apa saja pembangunan yang perlu diprioritaskan. Hasil musyawarah tersebut kemudian dapat dijadikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan yang perlu disediakan untuk pembangunan desa.

Dari keseluruhan tanggapan responden yang diperoleh dari kuisioner dan wawancara sebagaimana yang telah diuraikan di atas, serta hasil observasi maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat menyatakan OMS selalu mengikuti musyawarah rencana pembangunan desa, ini menunjukkan bahwa anggota OMS telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik. Kemudian hanya sebagian kecil saja masyarakat yang menyatakan kurang tau bahwa OMS mengikuti musawarah rencana pembangunan desa, ini menjelaskan bahwa masyarakat kurang aktif dalam mengikuti musawarah rencana pembangunan desa.

Selanjutnya hanya beberapa orang saja yang menyatakan tidak tau bahwa OMS mengikuti musawarah rencana pembangunan desa, ini menunjukkan bahwa hanya beberapa

orang saja dari masyarakat yang tidak mengikuti sama sekali dalam musawarah rencana pembangunan di desa tersebut.

Secara keseluruhan OMS telah Mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah. Anggota OMS sebagai organisasi penggerak pembangunan rumah sederhana layak huni harus berperan aktif dan menjalankan tugasnya sebagai fungsi pengawasan pembangunan pemukiman masyarakat, terutama pada saat rapat perencanaan pembangunan pemukiman masyarakat di desa Koto Tinggi dan kinerja anggota OMS dikategorikan baik.

Musawarah rencana pembangunan desa dalam hal ini anggota OMS memiliki tanggung jawab yang besar dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat miskin di Desa Koto Tinggi. Pembangunan desa harus berdasarkan data dan aspirasi masyarakat yaitu melalui musawarah rencana pembangunan desa. Dengan adanya musawarah rencana pembangunan desa maka terlihat hasil dari kegiatan pembangunan telah tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Musawarah rencana pembangunan desa dalam hal ini anggota OMS adalah sebagai inisiator dalam terselenggaranya musawarah desa sebagai salah satu bentuk kegiatan penyerapan aspirasi dari masyarakat.

Keberadaan musawarah pembangunan desa secara resmi dalam proses perencanaan adalah satu kesempatan untuk benar-benar menerapkan prinsip pendekatan *bottom-up*. Jika dikaitkan dengan proses penganggaran, musawarah pembangunan desa merupakan salah satu tahapan di mana kebutuhan masyarakat bisa diidentifikasi dan dianggarkan (Rianingsih Djohani, FPPM 2008).

**Tabel V.6. Tanggapan Responden Tentang OMS dalam Menentukan Sarana dan Prasarana yang Harus Segera direalisasikan**

No	Penilaian	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Ikut	15	75,0 %
2	Sebagian	5	25,0 %
3	Tidak tau	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100,0 %</b>

*Suber : Data Hasil Penelitian*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata 15 responden atau 75,0% menyatakan OMS ikut dalam menentukan sarana dan prasarana yang harus segera direalisasikan di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden :

- *Semua anggota OMS ikut dalam menentukan sarana dan prasarana untuk segera direalisasikan bagi masyarakat miskin.*
- *OMS juga menentukan sarana dan prasarana untuk pembangunan pemukiman bagi masyarakat miskin.*
- *OMS harus segera menentukan sarana/ prasarana yang harus segera dibangun untuk masyarakat yang sangat membutuhkannya.*
- *Dalam hal ini OMS selalu ikut dalam menentukan sarana dan prasarana yang harus segera dilaksanakan.*
- *OMS di desa kami selalu berperan aktif terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan OMS, termasuk program rumah layak huni ini.*
- *Setiap menentukan sarana/ prasarana, anggota OMS selalu mengikutinya dengan rutin.*
- *Dikarenakan OMS harus menentukan dengan segera apa yang harus segera direalisasikan mengenai pembangunan perumahan rakyat.*
- *Karena pembangunan di desa kami harus ditentukan oleh OMS.*
- *Sebab apa bila OMS tidak menentukan sarana dan prasarana pembangunan, maka masyarakat merasa dikecewakan oleh pengurus OMS yang telah ditunjuk.*

Sementara itu terdapat 5 responden atau 25,0% menyatakan hanya sebagian anggota OMS yang ikut dalam menentukan sarana dan prasarana yang harus segera direalisasikan di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden :

- *Kadang-kadang ada juga anggota OMS yang tidak ikut, kemungkinan ada hal lain dan sebagainya.*
- *Hanya sebagian saja anggota OMS yang ikut.*
- *Saya kurang tau betul, karna saya tinggal di lading.*

Sehubungan dengan OMS dalam menentukan sarana dan prasarana yang harus segera direalisasikan untuk pembangunan di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tersebut, menurut Kepala Desa bahwa pengurus OMS di daerah setempat telah dapat menentukan sarana dan prasarana dengan baik, melalui kegiatan musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa dan menentukan sarana dan prasarana yang perlu diprioritaskan.

Lebih lanjut menurut Pengurus OMS di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tersebut, pada dasarnya OMS berupaya dalam menentukan sarana dan prasarana yang harus segera direalisasikan untuk pembangunan yang dilaksanakan di tingkat desa sehingga OMS dapat mengetahui sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Kemudian menurut Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah juga menjelaskan bahwa pengurus OMS telah menentukan sarana dan prasarana yang harus segera direalisasikan dalam pembangunan di desa tersebut dengan baik melalui gagasan dan saran yang disampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan yang dilaksanakan. Dalam hal ini TPM berupaya membantu OMS dalam menentukan sarana dan prasarana yang harus segera direalisasikan untuk pembangunan desa.

Sementara itu dari observasi yang dilakukan dapat dilihat bahwa pada dasarnya OMS di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah sudah baik dalam menentukan sarana dan prasarana yang harus segera direalisasikan untuk pembangunan di tingkat desa dan mengetahui apa saja pembangunan yang perlu diprioritaskan. Hasil tersebut kemudian dapat dijadikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan pembangunan sarana dan prasarana desa yang perlu disediakan.

Dari keseluruhan tanggapan responden yang diperoleh dari kuisioner dan wawancara sebagaimana yang telah diuraikan di atas, serta hasil observasi maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat menyatakan anggota OMS ikut dalam menentukan sarana dan prasarana yang harus segera direalisasikan, hal ini menunjukkan bahwa anggota OMS selalu aktif dalam menentukan sarana dan prasarana yang harus segera direalisasikan dan telah tepat pada sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan pemukiman bagi masyarakat miskin.

Kemudian hanya beberapa orang saja dari masyarakat yang berpendapat bahwa hanya sebagian dari anggota OMS yang ikut dalam menentukan sarana dan prasarana yang harus segera direalisasikan, ini menunjukkan bahwa anggota OMS belum sepenuhnya aktif dalam menentukan sarana dan prasarana yang harus segera direalisasikan di desa tersebut, sehingga dampak yang dirasakan oleh masyarakat dalam menentukan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh OMS tersebut belum tepat sasaran dan belum terlaksana dengan baik.

Namun secara keseluruhan dan penelitian yang dilakukan di lapangan anggota OMS telah menentukan sarana dan prasarana dalam mengidentifikasi prioritas pembangunan di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah sudah terlaksana sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, jika dikaitkan dengan tanggapan responden yang menyatakan hanya sebagian anggota OMS yang ikut dalam menentukan sarana dan prasarana maka tidak akan memberikan dampak negatif terhadap pembangunan desa, karena dalam hal ini hanya sebagian kecil saja dari masyarakat yang menyatakan hal tersebut, maka dari itu kinerja OMS dinilai dengan kategori baik.

Mekanisme *bottom-up planning* menjadi sangat penting dalam pengembangan sarana dan prasarana wilayah di pedesaan, dikarenakan beberapa hal, antara lain :

1. Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana secara terpusat sering kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga sering kurang dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat.
2. Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana secara terpusat sering mengabaikan potensi masyarakat setempat, sehingga potensi lokal tidak diberdayakan secara optimal.

Ke depan, dalam pengembangan sarana dan prasarana wilayah di pedesaan harus mengedepankan prinsip :

1. Perencanaan, pembangunan/pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana wilayah di pedesaan pada prinsipnya menjadi wewenang pemerintah dengan tetap melibatkan masyarakat. Adanya partisipasi nyata masyarakat di dalamnya.
2. Identifikasi kebutuhan, penyusunan perencanaan dan program serta penentuan prioritas investasi dan kegiatan-kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah di pedesaan ditingkatkan melalui mekanisme *bottom-up* dan *top-down*.
3. Sarana dan prasarana yang akan dibangun/dikembangkan harus mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat.
4. Perlu upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya yang ada setempat.
5. Sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat, sehingga sarana dan prasarana wilayah yang dibangun/ dikembangkan di pedesaan dapat memberikan manfaat nyata bagi aktivitas kehidupan dan perekonomian masyarakat setempat, (Rukmana, N., Steinberg F., dan van der Hoff, R., 1993)

#### B.2. Mengidentifikasi/ memetakan keadaan keluarga miskin di Desa

Mengidentifikasi/ memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di desa secara komprehensif, berlaku adil dan tidak diskriminatif adalah salah satu tugas dan tanggung jawab

OMS dalam mendata jumlah keluarga miskin yang berhak menerima bantuan Rumah Sederhana Layak Huni secara menyeluruh dan adil sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kegiatan OMS dalam mengidentifikasi/ memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di desa ini dimaksudkan agar OMS memperoleh data yang akurat tentang berapa banyak keluarga miskin yang berhak memperoleh bantuan pemukiman dari pemerintah. Untuk mengetahui peranan OMS dalam mengidentifikasi/ memetakan keadaan keluarga miskin di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dapat dilihat analisis tanggapan responden sebagai berikut :

**Tabel V.7 Tanggapan Responden Tentang OMS Dalam Melakukan Pendataan Keluarga Miskin Secara Komprehensif**

No	Penilaian	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Ikut	16	80,0 %
2	Kadang-kadang	1	5,0 %
3	Tidak tau	3	15,0 %
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100,0 %</b>

**Sumber :** Data Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel di atas terdapat rata-rata 16 responden atau 80,0% menyatakan bahwa OMS ikut dalam Melakukan Pendataan Keluarga Miskin Secara Komprehensif di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden :

- *Seluruh anggota OMS ikut mendata keluarga miskin, agar tidak melenceng dari sasaran yang diinginkan.*
- *OMS mendatangi rumah-rumah untuk mendata keluarga miskin yang ada di desa Koto Tinggi ini.*
- *Karena OMS harus mendata secara keseluruhan terhadap masyarakat yang kurang mampu di desa ini.*
- *Dalam mendata keluarga/ masyarakat miskin, anggota OMS menurut saya sudah melakukan pendataan secara komprehensif dan benar.*
- *OMS pada desa ini ikut dalam mendata masyarakat yang mendapatkan/ membutuhkan rumah layak huni.*
- *Dalam menentukan masyarakat miskin, OMS selalu ikut dalam mendata secara tepat dan benar.*

- *OMS mendatangi rumah-rumah untuk didata terutama masyarakat miskin.*
  - *Anggota OMS secara rutin mendata keluarga miskin di desa Koto Yinggi ini.*
- Sementara itu terdapat 1 responden atau 5,0% menyatakan bahwa OMS kadang-kadang

dalam Melakukan Pendataan Kelurga Miskin Secara Komprehensif di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden :

- *Yang hanya saya ketahui Cuma sekali OMS malakukan pendataan.*

Kemudian terdapat rata-rata 3 responden atau 15,0% menyatakan tidak tau tentang OMS Melakukan Pendataan Kelurga Miskin Secara Komprehensif di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan reponden :

- *Dikarnakan saya tinggal di ladang.*
- *Karna saya pulang malam-malam dari kerja.*
- *Saya tidak tau apakah OMS ikut mendata keluarga miskin secara komprehensif.*

Berkaitan dengan fungsi OMS dalam Melakukan Pendataan Kelurga Miskin Secara Komprehensif di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tersebut, menurut Kepala Desa telah terlaksana dengan baik. Hal itu telah terlihat dari aktifitas pengurus OMS yang telah berupaya melakukan pendataan keluarga miskin yang berhak menerima bantuan rumah sederhana layak huni di desa tersebut.

Selanjutnya menurut Pengurus OMS di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tersebut, telah berupaya secara maksimal untuk dapat melakukan pendataan keluarga miskin yang ada di desa. Dengan demikian, OMS memperoleh data yang akurat mengenai kepala keluarga yang berhak menerima bantuan rumah sederhana layak huni.

Sementara itu, dari observasi yang dilakukan diketahui bahwa pada dasarnya OMS di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah sudah aktif dalam melakukan pendataan keluarga miskin yang ada di desa tersebut sehingga OMS memperoleh data yang akurat untuk dapat menentukan



secara adil keluarga yang berhak mendapat bantuan rumah sederhana layak huni yang disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan responden yang diperoleh melalui kuisioner dan wawancara sebagaimana yang telah diuraikan di atas, serta observasi yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari masyarakat berpendapat bahwa Anggota OMS ikut dalam melakukan pendataan keluarga miskin secara komprehensif, ini menunjukkan bahwa seluruh anggota OMS ikut secara aktif dalam melakukan pendataan keluarga miskin secara komprehensif, upaya ini agar tidak melenceng dari sasaran yang ingin dicapai terutama bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan rumah.

Selanjutnya hanya sebagian kecil masyarakat berpendapat bahwa anggota OMS kadang-kadang dalam melakukan pendataan keluarga miskin secara komprehensif, hal ini menunjukkan bahwa pihak OMS kurang mampu dalam melakukan pendataan keluarga miskin secara komprehensif, sehingga keluarga miskin yang berhak memperoleh bantuan rumah sederhana layak huni yang ada di desa tersebut belum sepenuhnya terdata secara menyeluruh.

Kemudian hanya sebagian kecil dari masyarakat menyatakan tidak tau tentang OMS dalam melakukan pendataan keluarga miskin secara komprehensif, ini menunjukkan bahwa masyarakat di desa tersebut kurang mengetahui terhadap OMS dalam melakukan pendataan keluarga miskin secara komprehensif, dikarenakan masyarakat jarang menetap di desa ataupun ada yang tinggal di ladang.

Namun secara keseluruhan melalui penelitian yang dilakukan dilapangan OMS sudah melakukan pendataan keluarga miskin secara komprehensif dan benar di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan semua kemampuan yang diupayakan oleh OMS agar masyarakat penerima bantuan rumah sederhana layak huni terdata secara menyeluruh dan meliputi semua

kalangan masyarakat miskin yang berada di Desa Koto Tinggi, maka dengan demikian jauh kemungkinan masyarakat menyatakan OMS tidak melakukan pendataan secara tidak baik, oleh sebab itu OMS sudah melaksanakan tugas dan tanggungnya dengan tepat dan benar, dan kinerja OMS dikategorikan baik.

**Tabel V.8 Tanggapan Responden Tentang OMS Dalam Melakukan Pendataan Keluarga Miskin Secara Adil**

No	Penilaian	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sudah adil	12	60,0 %
2	Kadang-kadang	2	10,0 %
3	Kurang adil	6	30 %
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100,0 %</b>

*Sumber : Data Hasil Penelitian*

Berdasarkan tabel di atas terdapat rata-rata 12 responden atau 60,0% menyatakan bahwa OMS sudah adil dalam Melakukan Pendataan Keluarga Miskin Secara Adil di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan reponden :

- *Anggota OMS sudah adil dalam mendata keluarga miskin untuk penerima bantuan rumah.*
- *OMS sudah adil dalam mendata keluarga miskin.*
- *OMS sudah adil dalam menentukan atau mendata keluarga miskin, karena saya juga mendapatkan perumahan ini.*
- *Karena sudah tepat sasaran, artinya OMS sudah adil dalam memilih masyarakat yang berhak mendapatkan rumah layak huni.*
- *Menurut saya, OMS sudah dipercayakan untuk melakukan tugasnya dengan baik dan secara adil.*
- *Menurut saya OMS sudah adil dalam menentukan/ mendata keluarga miskin karena saya adlah salah satu masyarakat yang mendapatkan perumahan dari pemerintah.*

Sementara itu terdapat rata-rata 2 responden atau 10,0% menyatakan bahwa OMS kadang-kadang Melakukan Pendataan Keluarga Miskin Secara Adil di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden :

- *Saya menilai bahwa OMS kadang-kadang berlaku adil, karna masih ada masyarakat yang belum mendapatkan perumahan ini.*
- *Saya kurang tau apakah OMS sudah adil atau tidak, tapi saya melihat belum sepenuhnya adil dan tidak pula sepenuhnya tidak adil, saya simpulkan kadang-kadang saja.*

Kemudian terdapat rata-rata 6 responden atau 30,0% menyatakan bahwa OMS kurang adil dalam Melakukan Pendataan Keluarga Miskin Secara Adil di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden :

- *Dalam hal ini saya melihat adanya kurang tepat anggota pengurus OMS dalam mendata masyarakat miskin untuk mendapatkan pemukiman dari pemerintah.*
- *Untuk kegiatan ini saya menilai, adanya kurang tepat sasaran oleh OMS dalam mendata masyarakat miskin yang mestinya mendapat pembinaan yang layak.*
- *Saya pernah berbincang dengan masyarakat yang lain, bahwa OMS kurang adil, karna dia tidak mendapatkan bantuan rumah tersebut, padahal dia sudah memnuhi syarat untuk mendapatkan perumahan dari pemerintah.*
- *Karna masih banyak masyarakat yang mengeluh.*

Berkaitan dengan kinerja OMS dalam Melakukan Pendataan Keluarga Miskin Secara Adil di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tersebut, menurut Kepala Desa telah terlaksana dengan baik. Hal itu telah terlihat dari aktifitas pengurus OMS yang telah berupaya melakukan pendataan keluarga miskin yang berhak menerima bantuan rumah sederhana layak huni di desa tersebut secara adil.

Selanjutnya menurut Pengurus OMS di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tersebut, telah berupaya secara maksimal untuk dapat Melakukan Pendataan Keluarga Miskin Secara Adil yang ada di desa. Dengan demikian, OMS memperoleh data yang akurat mengenai kepala keluarga yang berhak menerima bantuan rumah sederhana layak huni.

Sementara itu, dari observasi yang dilakukan diketahui bahwa pada dasarnya OMS di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah sudah aktif untuk Melakukan Pendataan Keluarga Miskin Secara Adil yang ada di desa tersebut sehingga OMS memperoleh data yang akurat untuk dapat menentukan secara adil keluarga yang berhak mendapat bantuan rumah sederhana layak huni yang disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan responden yang diperoleh melalui kuisioner dan wawancara sebagaimana yang telah diuraikan di atas, serta observasi yang dilakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa anggota OMS sudah adil dalam melakukan pendataan keluarga miskin yang ada di Desa Koto Tinggi, ini menjelaskan bahwa masyarakat menilai OMS sudah adil dalam melakukan pendataan keluarga miskin sehingga masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan rumah sudah terpenuhi secara adil dan tepat pada sasaran yang ingin dicapai.

Kemudian sebagian kecil masyarakat menyatakan bahwa pihak OMS kadang-kadang berlaku adil dalam melakukan pendataan keluarga miskin, ini menunjukkan bahwa anggota OMS kurang mampu melakukan pendataan keluarga miskin secara adil, sehingga keluarga miskin yang berhak memperoleh bantuan rumah sederhana layak huni belum terdata secara menyeluruh, karna masih ada masyarakat yang menyatakan belum mendapatkan bantuan rumah sederhana layak huni dari pemerintah.

Selanjutnya hanya beberapa orang dari masyarakat menyatakan bahwa OMS kurang adil dalam mendata keluarga miskin, hal ini dikarenakan pihak OMS tidak mampu secara maksimal dalam melakukan pendataan keluarga miskin di Desa Koto Tinggi tersebut karena masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan perumahan layak huni.

Secara keseluruhan dan hasil penelitian di lapangan anggota OMS cukup baik dalam Melakukan Pendataan Keluarga Miskin Secara Adil di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tersebut, karena terdapat sebanyak 30% dari masyarakat menyatakan OMS kurang adil dalam melakukan pendataan keluarga miskin, ini menunjukkan bahwa anggota OMS belum mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai fungsi pengawasan pembangunan rumah layak huni di Desa Koto Tinggi tersebut, dalam hal ini kinerja OMS dikategorikan kurang baik.

### B.3. Menyusun Rencana Kegiatan

Menyusun Rencana Kegiatan adalah salah satu tugas tanggung jawab OMS dalam menyusun rencana kegiatan pembangunan bantuan sarana/ prasarana desa serta anggaran biaya yang dibutuhkan. Dalam hal ini OMS menyusun perencanaan yang meliputi rencana pelaksanaan kegiatan fisik serta anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan pemukiman rumah sederhana layak huni bagi masyarakat miskin yang telah terdaftar sebagai pihak yang berhak menerima bantuan pemukiman di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tersebut.

Untuk mengetahui fungsi pengawasan OMS dalam menyusun rencana kegiatan pembangunan di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dapat dilihat analisis tanggapan responden sebagai berikut :

**Tabel V.9. Tanggapan Responden Tentang OMS dalam Menyusun Rencana Pembangunan Sarana/ prasarana**

No	Penilaian	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Baik	19	95,0 %
2	Cukup Baik	-	0,0 %
3	Kurang Baik	1	5,0 %
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100,0 %</b>

**Sumber : Data Hasil Penelitian**

Berdasarkan tabel di atas terdapat rata-rata 19 responden atau 95,0% menyatakan pihak OMS baik dalam melakukan dalam Menyusun Rencana Pembangunan Sarana/ prasarana di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden :

- *Penyusunan rencana kegiatan pembangunan sarana/ prasarana sudah baik dilakukan oleh OMS.*
- *Untuk menyusun rencana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sudah berjalan dengan baik oleh OMS.*
- *Saya menilai sudah baik, karena tidak adanya simpang siur dalam pelaksanaan pembangunan.*
- *Karena sudah berjalan dengan semestinya dan berdasarakan prosedur yang ada.*
- *Karena OMS harus menyusun rencana kegiatan dengan teliti, supaya program yang dilaksanakan harus berjalan dengan prosedur.*
- *Menurut pendapat saya sudah baik karena tidak ada hambatan bagi OMS dalam penyusunan rencana kegiatan.*
- *Saya menilai OMS dalam penyusunan kegiatan perencanaan pembangunan tidak ada yang terkendala, dalam arti berjalan baik-baik saja.*
- *Untuk menyusun rencana kegiatan pembangunan saya menilai sudah baik.*
- *Karena dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan, saya sebagai masyarakat menilai aktifitas OMS sudah berjalan dengan baik.*
- *Saya merasa sudah baik.*

Kemudian pada tabel di atas menunjukkan bahwa 1 responden atau 5,0% menyatakan OMS kurang baik dalam Menyusun Rencana Pembangunan Sarana/ prasarana di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden:

- *Karena pernah terjadinya kemacetan dalam kegiatan pembangunan.*

Sehubungan dengan fungsi pengawasan OMS dalam Menyusun Rencana Pembangunan Sarana/ prasarana di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tersebut, menurut Kepala Desa telah terlaksana dengan baik. Hal itu telah terlihat dari aktifitas pengurus OMS yang telah Menyusun Rencana Pembangunan Sarana/ prasarana yang dibutuhkan di desa.

Selanjutnya menurut pengurus OMS di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tersebut bahwa OMS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam Menyusun Rencana Pembangunan Sarana/ prasarana yang dibutuhkan masyarakat desa.

Kemudian menurut Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah bahwa untuk memperlancarkan pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah sederhana di desa tersebut, TPM telah berupaya membantu OMS dalam Menyusun Rencana Pembangunan Sarana/ prasarana yang dibutuhkan di desa. Disamping itu pihak TPM juga membantu kelancaran kegiatan pembangunan desa dengan melakukan pengawasan dan mutu dan volume pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah diselesaikan, serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut.

Demikian pula menurut observasi yang dilakukan, pada umumnya OMS di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah baik dalam menyusun rencana pembangunan sarana/ prasarana yang dibutuhkan di desa tersebut. Di samping itu, OMS juga menyusun anggaran pembangunan sarana/ prasarana yang dibutuhkan kerjasama dengan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).

Berdasarkan keseluruhan tanggapan responden yang diperoleh melalui kuisioner dan wawancara sebagaimana yang telah diuraikan di atas serta dari observasi yang dilakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa sebagian besar masyarakat menyatakan OMS sudah baik dalam menyusun rencana pembangunan sarana dan prasarana, ini menunjukkan bahwa OMS sudah melakukan penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Kemudian hanya sebagian kecil masyarakat yang menyatakan OMS kurang baik dalam melakukan penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana di Desa Koto Tinggi

tersebut, hal ini dikarenakan pihak OMS tidak membuat perencanaan yang diperlukan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Namun secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa anggota OMS dalam Menyusun Rencana Pembangunan Sarana dan prasarana di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah sudah terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat merasa kegiatan yang dilakukan oleh OMS tersebut sudah baik sesuai dengan rencana yang telah disusun dan selaras pula dengan harapan masyarakat penerima bantuan rumah layak huni dan kinerja OMS dikategorikan baik.

Di dalam menyelenggarakan urusan pembangunan sarana dan prasarana perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan sarana dan prasarana yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana pembangunan bagi kemajuan desa itu sendiri. Sistem perencanaan pembangunan sarana dan prasarana terdiri dari 4 tahapan yaitu:



1. Penyusunan rencana pembangunan
2. Penetapan rencana pembangunan
3. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh.

**Tabel V.10. Tanggapan Responden Tentang OMS dalam Menyusun Anggaran Pembangunan Sarana/ prasana**

No	Penilaian	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sudah baik	14	70,0 %
2	Cukup Baik	4	20,0 %
3	Kurang Baik	2	10,0 %
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100,0 %</b>

**Sumber :** Data Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel di atas terdapat rata-rata 14 responden atau 70,0% menyatakan pihak OMS sudah baik dalam melakukan pengawasan dan Menyusun Anggaran Pembangunan Sarana/ prasana di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden :

- *Penyusunan anggaran dalam dalam pembangunan sudah sesuai dan berjalan dengan baik.*
- *Karena dalam penyusunan anggaran kegiatan pembangunan tidak ada terjadi penyelewengan dana oleh OMS.*
- *Sependapat saya sudah baik, karna sudah berjalan dengan semestinya.*
- *Sejauh ini belum terdapat ketimpangan-ketimpangan bagi OMS dalam penyusunan anggaran pemukiman bagi masyarakat.*
- *Karena sudah sesuai dengan prosedur.*
- *OMS sudah melakukannya dengan baik.*
- *Kami merasa sudah baik disaat OMS menyusun anggaran pembangunan.*
- *Dalam penyusunan anggaran OMS melaksanakannya dengan rapi dan tidak ada terjadi ketimpangan, menurut yang saya ketahui.*

- *Menurut penilaian saya sudah berjalan dengan baik sebagaimana yang telah tersusun sebagai anggaran kegiatan.*

Selanjutnya pada tabel di atas terdapat rata-rata 4 responden atau 20,0% menyatakan pihak OMS cukup baik dalam melakukan Menyusun Anggaran Pembangunan Sarana/ prasana di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden :

- *Karena dalam penyusunan anggaran OMS masih mengalami kesulitan.*
- *Saya kurang tau dengan penyusunan anggaran yang dilakukan oleh OMS.*

Kemudian pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata 2 responden atau 10,0% menyatakan OMS kurang baik dalam Menyusun Anggaran Pembangunan Sarana/ prasana di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden :

- *Karena masih ada ketimpangan dengan anggaran.*
- *Dalam hal ini masih terdapat simpang siur.*

Sehubungan dengan fungsi pengawasan OMS dalam Menyusun Anggaran Pembangunan Sarana/ prasana di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tersebut, menurut Kepala Desa telah terlaksana dengan baik. Hal itu telah terlihat dari aktifitas pengurus OMS yang telah melakukan penyusunan Menyusun Anggaran Pembangunan Sarana/ prasana yang dibutuhkan di desa.

Selanjutnya menurut pengurus OMS di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tersebut bahwa OMS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam Menyusun Anggaran Pembangunan Sarana/ prasana yang dibutuhkan masyarakat desa.

Kemudian menurut Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah bahwa untuk memperlancarkan pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah sederhana di desa tersebut, TPM telah berupaya membantu OMS dalam Menyusun Anggaran

Pembangunan Sarana/ prasarana yang dibutuhkan di desa. Disamping itu pihak TPM juga membantu kelancaran kegiatan pembangunan desa dengan melakukan pengawasan dan mutu juga volume pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah diselesaikan, serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut.

Demikian pula menurut observasi yang dilakukan, pada umumnya OMS di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah sudah baik dalam menyusun anggaran pembangunan sarana/ prasarana yang dibutuhkan kerjasama dengan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).

Berdasarkan keseluruhan tanggapan responden yang diperoleh melalui kuisioner dan wawancara sebagaimana yang telah diuraikan di atas serta dari observasi yang dilakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa sebagian besar masyarakat yang menyatakan OMS sudah baik dalam menyusun anggaran pembangunan sarana dan prasarana, hal ini menunjukkan bahwa pihak OMS telah menyusun anggaran pembangunan sarana dan prasarana desa secara tepat dan terarah untuk biaya pembangunan masyarakat desa, karena kinerja OMS tersebut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diharapkan oleh masyarakat.

Kemudian hanya sebagian kecil masyarakat yang menyatakan bahwa OMS cukup baik dalam menyusun anggaran pembangunan sarana dan prasarana, hal ini menjelaskan bahwa anggota OMS belum sepenuhnya efektif pada saat melakukan penyusunan anggaran karena masyarakat menilai OMS dalam hal ini masih mengalami kesulitan, maka dampaknya akan mengakibatkan pembangunan yang dilakukan tidak berjalan dengan target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya sangat kecil sekali masyarakat berpendapat bahwa OMS kurang baik dalam menyusun anggaran pembangunan sarana dan prasarana pembangunan pemukiman masyarakat desa tersebut, hal ini menjelaskan bahwa hanya sebagian kecil dari anggota OMS yang tidak mampu menyusun anggaran pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di desa

tersebut, karena masyarakat menilai masih adanya ketimpangan dalam penyusunan anggaran pembangunan rumah layak huni tersebut, maka dampak yang akan ditimbulkan adalah tidak berjalannya pembangunan pemukiman masyarakat sesuai dengan perencanaan.

Namun secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka dapat dinilai bahwa fungsi pengawasan OMS dalam Menyusun Anggaran Pembangunan Sarana/ prasarana di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah sudah terlaksana secara tepat dan benar, dalam hal ini OMS telah berupaya sebaik mungkin supaya anggaran pembangunan dapat dimanfaatkan dengan baik demi kepentingan masyarakat yang membutuhkan bantuan perumahan tersebut, maka kinerja OMS dalam hal ini dikategorikan baik.

#### B.4. Memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong-royong

Memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong-royong adalah tugas dan tanggung jawab OMS dalam upaya untuk mendorong dan menggerakkan partisipasi/ swadaya masyarakat dengan cara mengumpulkan dan menyerap aspirasi masyarakat serta melibatkan warga dalam pengambilan keputusan dalam rapat/ musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Dengan memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong-royong, maka diharapkan masyarakat desa dapat berperan serta dalam kegiatan pembangunan rumah sederhana layak huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tersebut, baik melalui gagasan dan saran yang diusulkan maupun keterlibatan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di desa.

Untuk mengetahui fungsi pengawasan OMS dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan saran dapat dilihat analisis tanggapan responden sebagai berikut :

**Tabel V.11. Tanggapan Responden Tentang OMS dalam Memberikan Kesempatan Kepada Masyarakat Untuk Menyampaikan Gagasan/ saran**

No	Penilaian	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Baik	13	65,0 %
2	Kurang Baik	4	20,0%
3	Tidak Baik	3	15,0 %
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100,0 %</b>

*Sumber : Data Hasil Penelitian*

Berdasarkan tabel di atas terdapat rata-rata 13 responden atau 65,0% menyatakan bahwa pihak OMS baik dalam Memberikan Kesempatan Kepada Masyarakat Untuk Menyampaikan Gagasan/ saran kepada masyarakat di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden :

- Masyarakat merasa tersanjung dengan kesempatan yang diberikan oleh OMS untuk menyampaikan saran tentang pembangunan rumah ini.
- Kesempatan selalu diberikan oleh OMS dalam menyampaikan usulan/ gagasan dari masyarakat.
- Ide dan gagasan masyarakat diterima oleh OMS.
- Masyarakat dalam menyampaikan usulannya diterima oleh OMS dengan baik.
- Mengenai pembangunan masyarakat dibutuhkan oleh OMS untuk menyampaikan saran/ usulan dari masyarakat.
- OMS menyambut dengan baik usulan/ gagasan yang disampaikan oleh masyarakat.
- Pihak OMS selalu memberikan kepada masyarakat untuk menyampaikan sarannya.
- OMS sering mengajak masyarakat untuk mengeluarkan pendapat masing-masing.
- Kesempatan untuk menyampaikan saran/ gagasan OMS memberikan keleluasaan kepada masyarakat selagi dalam kontek pembangunan pemukiman bagi masyarakat yang membutuhkan.

- *Karena OMS sudah menjelaskan kepada masyarakat tentang kegiatan/ program rumah layak huni ini.*

Kemudian pada tabel di atas rata-rata 4 responden atau 20,0% yang menyatakan bahwa pihak OMS kurang baik dalam Memberikan Kesempatan Kepada Masyarakat Untuk Menyampaikan Gagasan/ saran kepada masyarakat di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden :

- *Karena pendapat masyarakat masih ada yang disepelekan oleh anggota OMS.*
- *Untuk menyampaikan gagasan dari masyarakat, OMS tidak terlalu menanggapi saran dari masyarakat.*
- *Kesempatan masyarakat dalam menyampaikan saran, ada yang ditanggapi dan ada juga yang tidak.*

Kemudian pada tabel di atas terdapat 3 responden atau 15,0% yang menyatakan bahwa pihak OMS tidak baik dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan/ saran mengenai pembangunan desa di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden :

- *Karena masyarakat dalam menyampaikan sarannya masih ada dari pihak OMS yang tidak menanggapi dengan baik.*
- *Masyarakat dalam menyampaikan ide/ gagasan kurang ditanggapi dengan baik oleh anggota OMS.*

Berkaitan dengan fungsi pengawasan OMS di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tersebut, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Koto Tinggi menjelaskan bahwa pihak OMS telah Memberikan Kesempatan Kepada Masyarakat Untuk Menyampaikan Gagasan/ sarannya. Hal itu terlihat dari aktivitas pengurus OMS yang selalu berupaya memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk menyampaikan gagasan dan saran.

Selanjutnya menurut pengurus OMS di Desa Koto Tinggi tersebut bahwa OMS berupaya untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat desa untuk

menyampaikan gagasan dan saran mengenai pembangunan yang dilaksanakan di desa dan mengenai prioritas pembangunan yang dibutuhkan masyarakat desa.

Setelah itu dari observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pada umumnya OMS dalam Memberikan Kesempatan Kepada Masyarakat Untuk Menyampaikan Gagasan/ saran kepada masyarakat di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah sudah baik. Ini dapat dilihat dari upaya OMS untuk mendorong masyarakat agar menyampaikan aspirasi atau gagasannya berkaitan dengan pembangunan desa.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan responden yang diperoleh melalui kuisioner dan wawancara sebagaimana yang telah diuraikan di atas serta observasi yang dilakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa anggota OMS baik dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan saran, ini menjelaskan bahwa anggota OMS sudah berupaya secara maksimal untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyampaikan gagasan dan saran untuk pembangunan pemukiman masyarakat tersebut.

Kemudian hanya sebagian kecil masyarakat menyatakan bahwa anggota OMS kurang baik dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan saran, hal ini menjelaskan bahwa pihak OMS belum sepenuhnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan saran dari masyarakat, karena saran yang disampaikan oleh masyarakat OMS tidak terlalu menanggapi.

Selanjutnya hanya sebagian kecil saja masyarakat menyatakan bahwa OMS tidak baik dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan sarannya, ini menjelaskan bahwa hanya sebagian kecil dari masyarakat yang menilai bahwa pihak OMS tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyampaikan gagasan dan saran

untuk kepentingan pembangunan pemukiman bagi masyarakat miskin, karena adanya masyarakat dalam menyampaikan saran tidak sama sekali ditanggapi oleh anggota OMS.

Namun secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa pihak OMS telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan sarannya, agar pembangunan perumahan tersebut tercipta atas kerja sama dan kesepakatan bersama antara masyarakat dengan OMS di lingkungan Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, maka kinerja OMS dalam hal ini dikategorikan baik.

**Tabel V.12. Tanggapan Responden Tentang OMS untuk Melibatkan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa**

No	Penilaian	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Baik	13	65,0 %
2	Kurang Baik	5	25,0 %
3	Tidak Baik	2	10,0 %
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100,0 %</b>

**Sumber :** Data Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel di atas terdapat rata-rata 13 responden atau 65,5% menyatakan bahwa pihak OMS baik dalam Melibatkan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Desadi Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan reponden :

- *Dalam pengambilan keputusan OMS mengikut sertakan masyarakat.*
- *Dalam pengambilan keputusan OMS juga memberikan kesempatan dengan baik kepada masyarakat desa.*
- *Di dalam pengambilan keputusan, masyarakat selalu diberikan kesempatan oleh anggota OMS.*
- *OMS mengikut sertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan.*
- *OMS pada desa ini selalu melakukan Tanya jawab/ rapat dan diskusi dengan masyarakat dan membuka diri untuk masyarakat yang mengajukan pendapat ataupun saran.*
- *Dalam pengambilan keputusan OMS selalu mengikut sertakan masyarakat, agar adanya pendapat dari masyarakat dalam pengambilan keputusan ini.*



- Masyarakat juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
- OMS juga memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- Dalam pengambilan keputusan OMS juga melibatkan masyarakat dan diputuskan secara bersama-sama.
- Karena OMS tidak mau main hakim sendiri, agar terjadinya keseimbangan antara OMS dengan masyarakat di Desa Koto Tinggi ini.

Selanjutnya pada tabel di atas terdapat rata-rata 5 responden atau 25,0% menyatakan bahwa pihak OMS kurang baik dalam Melibatkan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden :

- Dalam pengambilan keputusan, OMS selalu mementingkan keputusan sesama anggota OMS saja.
- Dalam pengambilan keputusan masyarakat jarang diikut sertakan.
- Hanya sebagian dari masyarakat saja yang diberikan kesempatan.

Kemudian pada tabel di atas 2 responden atau 10,0% yang menyatakan bahwa pihak OMS tidak baik dalam melibatkan masyarakat untuk Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden :

- Karena masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan perumahan masyarakat miskin.
- Karena saya menilai di dalam pengambilan keputusan adanya unsur sepihak dan tidak merakyat.

Berkaitan dengan fungsi pengawasan OMS di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tersebut, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Koto Tinggi menjelaskan bahwa pihak OMS telah Melibatkan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa. Hal itu terlihat dari aktivitas pengurus OMS yang selalu berupaya memberikan kepada warga masyarakat desa dalam mengambil keputusan mengenai pembangunan desa.

Selanjutnya menurut pengurus OMS di Desa Koto Tinggi tersebut bahwa OMS berupaya untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat desa untuk

mengikut sertakan masyarakat dalam mengambil keputusan mengenai prioritas pembangunan yang dibutuhkan masyarakat desa.

Setelah itu dari observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pada umumnya OMS Melibatkan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah sudah baik. Ini dapat dilihat dari upaya OMS untuk mendorong masyarakat agar menyampaikan aspirasi atau gagasannya berkaitan dengan pembangunan desa.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan responden yang diperoleh melalui kuisioner dan wawancara sebagaimana yang telah diuraikan di atas serta observasi yang dilakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa sebagian besar masyarakat menyatakan pihak OMS baik dalam melibatkan masyarakat untuk pengambilan keputusan pembangunan desa, ini menyatakan bahwa masyarakat puas terhadap anggota OMS, karena telah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan desa secara terbuka agar adanya kesepakatan antara OMS dengan masyarakat penerima bantuan pemukiman rumah layak huni.

Kemudian hanya sebagian kecil saja masyarakat menyatakan anggota OMS kurang baik dalam melibatkan masyarakat untuk pengambilan keputusan pembangunan desa, hal ini menjelaskan bahwa pihak OMS kurang baik untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan desa, karena adanya masyarakat yang kurang puas dalam pengambilan keputusan yang diberikan kesempatan oleh OMS terhadap pembangunan pemukiman masyarakat desa.

Selanjutnya sangat minim sekali masyarakat menyatakan bahwa pihak OMS tidak baik dalam melibatkan masyarakat untuk pengambilan keputusan pembangunan desa, ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari masyarakat yang menyatakan kurang puas

terhadap anggota OMS, karena OMS tidak berupaya sama sekali untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan rumah sederhana layak huni tersebut.

Namun secara keseluruhan dan hasil penelitian di lapangan bahwa pihak OMS telah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan desa, karena OMS selalu mengajak masyarakat secara bersama-sama dan bergotong royong dalam pembangunan rumah sederhana layak huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah maka kinerja OMS dalam hal ini dikategorikan baik.

Untuk mengetahui fungsi pengawasan OMS dalam Pembangunan Desa di Desa Koto Tinggi dapat dilihat dari hasil rekapitulasi keseluruhan tanggapan responden. Adapun rekapitulasi keseluruhan tanggapan responden tentang Fungsi Pengawasan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam pembangunan rumah sederhana layak huni tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel V.13. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam Pengadaan Rumah Layak Huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu**

No	Indikator Penelitian	Kategori Penilaian			
		Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	Jumlah
1	Mengidentifikasi prioritas pembangunan desa	13 (65,0%)	6 (30,0%)	1 (5,0%)	20 (100%)
2	Mengidentifikasi/memetakan keadaan keluarga	14 (70,0%)	2 (10,0%)	4 (20,0%)	20 (100%)

	miskin yang ada di desa				
3	Menyusun rencana kegiatan	17 (85,0%)	2 (10,0%)	1 (5,0%)	20 (100%)
4	Memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong-royong	13 (65,0%)	5 (25,0%)	2 (10,0%)	20 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>57</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>80</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>14.25</b>	<b>3.75</b>	<b>2</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>71.25%</b>	<b>18.75%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data Olahan Penelitian 2011*

Berdasarkan rekapitulasi pada tabel di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan indikator variabel yang penulis ajukan kepada responden mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tugas dan tanggung jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam pengadaan rumah sederhana layak huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah termasuk dalam kategori baik, di mana indikator tersebut meliputi mengidentifikasi prioritas pembangunan desa, mengidentifikasi/ memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di desa, menyusun rencana kegiatan serta memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong-royong yang terlihat dari hasil rata-rata rekapitulasi tanggapan responden yang menyatakan baik sebanyak 14.25 responden atau 71.25%, sementara itu hanya sebagian kecil masyarakat yang

menyatakan OMS kurang baik yaitu 3.75 responden atau 18.75%, dan yang menyatakan tidak baik adalah 2 responden atau 10%.

Dengan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni Desa di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

**C. Hambatan-hambatan yang Mempengaruhi Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam Pengadaan Rumah Sederhana Layak Huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu**

Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang dibentuk secara demokratis adalah sangat penting fungsinya untuk keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Keberadaan organisasi ini pada dasarnya akan lebih menunjang terlaksananya efektivitas pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Oleh sebab itu, pihak pemerintah beserta masyarakat desa harus bersama-sama mendukung aktifitas dan program yang direncanakan oleh OMS.

Namun untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, suatu lembaga kemasyarakatan juga tidak luput dari berbagai hambatan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun hambatan yang mempengaruhi terhadap tugas dan tanggung jawab OMS dalam Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat desa di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, antara lain adalah :

1. Masih rendahnya kepedulian masyarakat untuk berperan serta dalam musyawarah rencana pembangunan ditingkat desa dalam menyampaikan gagasan dan saran mengenai pembangunan yang perlu diprioritaskan di desa.
2. Belum lengkapnya data dan informasi mengenai masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan pemukiman. Hal ini menyebabkan pemberian bantuan Rumah Sederhana Layak Huni bagi masyarakat desa kurang tepat sasaran, dimana belum secara keseluruhan masyarakat miskin yang berhak mendapatkan Rumah Sederhana Layak Huni tersebut, sedangkan mereka telah memenuhi syarat atau kriteria untuk mendapatkan Rumah Sederhana Layak Huni sesuai program kebijakan pemerintah daerah.
3. Belum memadai ketersediaan tenaga teknis yang akan membantu OMS dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya mengidentifikasi usulan kegiatan masyarakat desa, menyusun rencana kegiatan pelaksanaan dan anggaran biaya pembangunan, serta pengawasan kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana desa yang dilaksanakan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penulis mengambil suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengadaan rumah layak huni dan juga kepada pemerintahan desa di Desa Koto Tinggi Kecamatan Ramabah Kabupaten Rokan Hulu.

Dengan melihat dari berbagai uraian yang telah dijelaskan di atas dalam penelitian ini, maka pada akhir bab ini penulis menguraikan kesimpulan di mana dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Analisis Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam Pengadaan Rumah Layak Huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dapat disimpulkan antarlain :

##### **1. Mengidentifikasi prioritas pembangunan desa.**

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis simpulkan bahwa Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengidentifikasi prioritas pembangunan desa dengan baik, sehingga perencanaan pembangunan sarana dan prasarana telah berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

##### **2. Mengidentifikasi atau memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di desa.**

Tugas dan tanggung jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) di dalam mengidentifikasi atau memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di desa tidak terlaksana

dengan baik, karena pendataan masyarakat miskin tidak dilakukan secara merata, hal ini berdampak pada pemberian rumah layak huni kurang tepat pada sasaran terhadap masyarakat miskin yang lebih membutuhkan bantuan rumah layak huni tersebut.

3. Menyusun rencana kegiatan.

Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun rencana kegiatan pembangunan rumah layak huni dengan baik, sehingga pembangunan sarana dan prasarana rumah layak huni sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

4. Memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong-royong.

Kemudian tentang tugas dan tanggung jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong-royong cukup baik, ini menjelaskan bahwa masih adanya masyarakat yang kurang diberikan kesempatan oleh OMS dalam menyampaikan gagasan dan saran untuk kepentingan pembangunan rumah layak huni di Desa Koto Tinggi tersebut.

## **B. Saran**

Agar Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dapat lebih baik dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal dalam pengadaan rumah layak huni di Desa Koto Tinggi dimasa mendatang, maka disarankan :

1. Mengidentifikasi prioritas pembangunan desa.



Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) harus lebih giat lagi untuk mensosialisasikan program pemberdayaan dalam pembangunan rumah layak huni di Desa Koto Tinggi sehingga masyarakat desa lebih berpartisipasi untuk mensukseskan kegiatan pemberdayaan dalam pembangunan rumah layak huni tersebut.

2. Mengidentifikasi atau memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di desa.

Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) harus lebih selektif dalam melakukan pendataan keluarga miskin yang lebih berhak memperoleh bantuan rumah layak huni sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga pemberian bantuan rumah layak huni tersebut tepat pada sasaran yang ingin dicapai yaitu terhadap masyarakat miskin yang lebih membutuhkan.

3. Menyusun rencana kegiatan.

Pihak pemerintah daerah harus menyediakan tenaga teknis khusus untuk membantu Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di lapangan seperti pada saat pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik, kemudian menyusun rencana kegiatan dan anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan rumah sederhana layak huni di Desa Koto Tinggi.

4. Memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong-royong.

Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) disarankan agar lebih memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan atau aspirasinya di dalam pengambilan keputusan pembangunan rumah layak huni agar terciptanya keselarasan dan tujuan yang ingin dicapai bersama.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan pada dasarnya merupakan usaha untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan baik secara lahiriah maupun batiniah. Kesejahteraan sosial adalah tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan juga merupakan usaha yang strategis untuk mengangkat harkat, martabat, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan adalah suatu proses yang mutlak diperlukan terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang, karena tanpa adanya pembangunan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan maka akan mustahil suatu bangsa dan negara dapat mengikuti perkembangan dunia yang semakin moderen dan bahkan lambat laun akan menjadi bangsa yang keterbelakangan.

Sebagai salah satu negara yang berkembang, maka negara kita Indonesia ini juga senantiasa giat melaksanakan pembangunan, baik yang berskala nasional maupun ditingkat daerah, sampai ke kecamatan dan desa-desa. Pembangunan pada hakekatnya suatu upaya untuk menciptakan perubahan yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat.

Pada dasarnya pemerintah dibentuk adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban serta bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bukanlah untuk melayani suatu kepentingan kelompok dan individu masing-

masing orang pribadi. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang dekat dengan rakyat, semakin dekat pemerintah dengan rakyat maka semakin baik pelayanan yang diberikan (Rasyid, 1999: 100).

Pelaksanaan pembangunan adalah suatu tugas pokok pemerintah daerah yang dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, termasuk di tingkat pedesaan. Menurut Bintoro (1987 : 34) bahwa lebih kurang 82% penduduk Indonesia berdiam dan tinggal di pedesaan, maka pembangunan pedesaan merupakan kunci seluruh proses pembangunan nasional yang harus mendapat perhatian sepenuhnya dari pemerintah.

Berhasilnya proses pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor, dimana salah satu diantaranya yang tidak boleh diabaikan adalah membentuk kesamaan visi antara pemerintah dengan masyarakat terhadap pembangunan tersebut. Sehingga pemerintah di satu pihak adalah perencana dan pelaksana pembangunan akan berupaya semaksimal mungkin sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang, sedangkan disisi lain masyarakat sebagai subjek dan juga objek pembangunan itu sendiri yang akan terdorong untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diwujudkan dalam berbagai cara dan bentuk. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan dukungan dalam bentuk materil seperti sumbangan uang ataupun benda, dan sejenisnya yang kemungkinan dapat dimanfaatkan dalam menunjang proses pembangunan. Masyarakat dapat juga memberi dukungan tenaga melalui kegiatan bergotong-royong. Selain itu juga masyarakat dapat memberikan secara

moril dengan menyumbangkan pemikirannya dalam musyawarah desa untuk merencanakan pemanfaatan dana bantuan pembangunan desa tersebut secara maksimal. Kemudian partisipasi melalui sikap dukungan terhadap pelaksanaan serta pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pembangunan tersebut.

Oleh karena itu pemerintah perlu berupaya mengerakkan partisipasi masyarakat sehingga memberikan dampak positif terhadap kelancaran proses pembangunan. Demikian pula halnya di Desa Koto Tinggi yang merupakan salah-satu wilayah di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat begitu luasnya aspek pembangunan itu sendiri, maka pelaksanaan pembangunan tentunya memerlukan perencanaan yang terpadu dan pendanaan yang memadai serta pengawasan yang efektif. Perencanaan sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan memberi manfaat sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah setempat. Pendanaan juga sangat dibutuhkan untuk pembiayaan proyek-proyek fisik dan non fisik yang dijalankan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah adanya pengawasan untuk menjamin agar berlangsungnya pembangunan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Oleh sebab itu, sangatlah diperlukan partisipasi aktif dan swadaya dari masyarakat setempat. Sebagaimana yang dikemukakan Bintoro (1987 : 25) bahwa, pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan terendah yaitu daerah pedesaan atau kelurahan terutama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat di dalam pembangunan desa atau kelurahan.

Oleh karenanya yang terpenting dalam pembangunan pedesaan adalah tercapainya kemandirian msyarakat desa dengan segala potensinya, melalui

partisipasi dan swadaya masyarakat dalam proses pembangunan desa sehingga menciptakan desa swadaya, swakarsa dan swasembada, serta mengarah pada tercapainya otonomi desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat dalam suatu wilayah hukum yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa dan merupakan perangkat pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri atas perangkat pemerintah desa, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 200 ayat 1 bahwa: Dalam pemerintah kabupaten/kota dibentuk pemerintah desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 202 disebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
- (3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Kemudian dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 206 ditegaskan bahwa: Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.

- c. Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Untuk membangun daerah tentunya selain sangat dibutuhkan adanya pendanaan yang cukup, juga diperlukan partisipasi aktif dari masyarakatnya. Hal ini sangat penting karena tanpa adanya partisipasi dari segenap warga masyarakat, maka proses pembangunan desa tidak dapat diharapkan berjalan dengan lancar dan pembangunan yang dilaksanakan kurang berhasil guna dan berdaya guna bagi masyarakat itu sendiri.

Jika berbicara mengenai pembangunan serta kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa publik oleh pemerintahan tidak terlepas dari salah satu tugas pokok pemerintah yang cukup penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengadaan barang dan jasa publik oleh pemerintah yang dibiayai dari APBD maupun APBN hendaknya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan dan perlakuan yang adil untuk semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, anggaran maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Salah satu pengadaan barang dan jasa publik yang sangat penting bagi masyarakat adalah penyedia sarana dan prasarana pemukiman (rumah). Apalagi mengingat bahwa sebahagian besar penduduk masih hidup dalam kemiskinan

terutama yang tinggal di pedesaan, maka pengadaan rumah sederhana yang layak huni diharapkan dapat membantu kesejahteraan masyarakat desa.

Sepertihalnya yang dilakukan di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, pengadaan rumah sederhana layak huni telah menjadi bagian program K2I oleh Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau No. 24 tahun 2008 . Rumah sederhana layak huni tentunya sangat penting dan dibutuhkan bagi masyarakat miskin di desa tersebut guna meningkatkan kesejahteraan dan menempati tempat tinggal yang layak.

Sedangkan bagi pemerintah, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, pembangunan rumah sederhana layak huni tersebut penting sekali untuk dilaksanakan guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat di daerahnya, di mana hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Pelaksanaan program pembangunan/pengadaan rumah sederhana layak huni tersebut ditujukan untuk masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Rambah pada umumnya dan di Desa Koto Tinggi pada khususnya. Adapun kriteria untuk ukuran sederhana layak huni yang dibangun yaitu rumah yang dilengkapi fasilitas MCK, (mandi,cuci,kakus). Sedangkan persyaratan atau kriteria masyarakat miskin yang berhak untuk mendapatkan rumah sederhana layak huni tersebut antara lain adalah:

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Memiliki Kartu Keluarga (KK).

3. Kondisi rumahnya telah rusak atau tidak layak pakai lagi.
4. Mata pencaharian petani.
5. Memiliki pendapatan perbulan < Rp 500.000,-
6. Janda yg memiliki tanggungan 4-5 orang anak.
7. Kepala keluarga dalam keadaan cacat fisik.

Untuk mensukseskan program ini tentunya sangat diharapkan peran serta masyarakat, baik secara perseorangan atau melalui kelompok/organisasi seperti Organisasi Masyarakat Setempat (OMS). Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu terdapat Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang dibentuk secara demokratis melalui musyawarah warga dan dilakukan secara transparan. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Koto Tinggi Nomor : 05/SK/ V/ 2008 Tentang Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Koto Tinggi. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Koto Tinggi tersebut ditetapkan Pengurus OMS Desa Koto Tinggi sebagai berikut :

Ketua	: Tusar Sasmito
Sekretaris	: Saripudin
Bendahara	: Suardi

Dengan demikian masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab yang lebih besar dalam menentukan dan merumuskan kebutuhan dasar akan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan dan menjadi prioritas masyarakat desa. Adapun tugas dan tanggung jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagaimana yang dijelaskan didalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur Riau



Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman dengan pola pemberdayaan Masyarakat Tahun 2009 adalah:

1. Mengidentifikasi prioritas pembangunan yang ada di desa.
2. Mengidentifikasi/memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di desa secara kofrehensif, berlaku adil dan tidak diskriminatif.
3. Menyusun Rencana Kegiatan, Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan bekerja sama dengan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).
4. Memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong-royong.

Program pembangunan rumah sederhana layak huni yang dilaksanakan sesuai yang telah dijelaskan dalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur Riau Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman dengan pola Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2009, merupakan program pembangunan yang berbasis pada pendekatan pemberdayaan serta partisipasi masyarakat melalui:

- a. Pembangunan yang berkualitas, artinya semua infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standard teknik yang telah ditetapkan.
- b. Keberpihakan pada kaum miskin, orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil diutamakan bagi penduduk miskin.
- c. Otonomi dan desentralisasi masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya.

- d. Partisipatif, masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan dengan semangat gotong-royong.

Adapun indikator keberhasilan pelaksanaan program pembangunan rumah sederhana layak huni tersebut sebagaimana yang disebutkan pada lampiran 1 Gubernur Riau Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman dengan pola Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2009:

- a. Terbangunnya Rumah Sederhana Layak Huni bagi masyarakat miskin dan infrastruktur dasar berupa Jalan Pedesaan dan Air Bersih Pedesaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan anggaran yang tersedia.
- b. Terbentuknya lembaga masyarakat pengelola yang bertanggung jawab terhadap berkelanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun.
- c. Memenuhi 3T yaitu Tepat Sasaran, Tepat Waktu dan Tepat Mutu.

Akan tetapi pelaksanaan pembangunan Desa dibidang pengadaan rumah sederhana layak huni untuk masyarakat miskin di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah belum terealisasi sesuai yang diharapkan. Adapun gejala-gejala dan fenomena yang ditemukan dari prasurvei yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan pembangunan Desa dibidang pengadaan rumah sederhana layak huni untuk masyarakat miskin tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1. Pemberian rumah layak huni bagi masyarakat desa tidak tepat pada sasaran, di mana masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan rumah layak huni tersebut, padahal mereka telah memenuhi syarat atau kriteria untuk mendapatkan rumah layak huni

sesuai program kebijakan pemerintah provinsi Riau. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan pengadaan rumah layak huni tersebut.

2. Data dan informasi mengenai masyarakat miskin kurang jelas atau tidak lengkap dikarenakan dalam pendataan masyarakat miskin di desa Koto Tinggi masih belum efektif, sehingga relatif masyarakat miskin yang tidak terdata untuk mendapat rumah layak huni.
3. Relatif rendahnya peran serta masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran untuk pemanfaatan dana bantuan pembangunan desa di bidang pengadaan rumah layak huni, baik dalam perencanaan, pelaksanaan sehingga hasil pembangunan kurang berhasil guna bagi masyarakat secara luas.
4. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dana bantuan desa untuk pengadaan rumah layak huni tersebut, yang berakibat terlambatnya proses pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan.
5. Belum maksimalnya pemanfaatan dana bantuan pembangunan desa untuk kepentingan pengadaan rumah layak huni di desa, akibatnya perencanaan pembangunan yang telah disusun tidak dapat direalisasikan secara optimal.

**Tabel I.1**  
**DAFTAR PENERIMA BANTUAN RSLH HASIL PERIFIKASI AKHIR**  
**DESA KOTO TINGGI KECAMATAN RAMBAH**  
**KABUPATEN ROKAN HULU**

NO	NAMA CALON	RANKING	TEMPAT TINGGAL
1	BUYUNG SUHERMAN	I	DUSUN NGARAI
2	SAPRI	II	DUSUN LUBUK BANDUNG HULU
3	HALIMATUH SAKDIAH	II	DUSUN LUBUK BANDUNG HULU
4	ABDUL HUSIN LUBIS	II	DUSUN LUBUK BANDUNG HULU
5	PANYAHATAN HSB	II	DUSUN LUBUK BANDUNG HULU
6	SUTEH	III	DUSUN NGARAI
7	AMINAH	III	DUSUN PASIR KOTA BARU
8	MANGARAJA AMAD	III	DUSUN LUBUK BANDUNG HULU
9	ARNELIS	III	DUSUN PASAR SENEN
10	DERLIANA	III	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
11	KARLINA	III	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
12	SUPRIADI	IV	DUSUN WONOSRI BARAT
13	SULASMI	IV	DUSUN WONOSRI BARAT
14	HARIS PUDDIN	IV	DUSUN WONOSRI TIMUR
15	LAHADI	IV	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
16	ROSLAWATI	IV	DUSUN LUBUK BANDUNG HULU
17	HAMDANI	V	DUSUN PASIR KOTA BARU
18	BAKRI LUBIS	V	DUSUN LUBUK BANDUNG HULU
19	ROBA'A NASUTION	V	DUSUN WONOSRI TIMUR
20	REDOAN	V	DUSUN PASAR SENEN
21	APRIADY	V	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
22	AKMAL	V	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
23	RAMADANI	V	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
24	ZULFAN S	V	DUSUN WONOSRI BARAT
25	PAISAL	VI	DUSUN KAMPUNG BARU
26	SYAHRUL	VI	DUSUN KAMPUNG BARU
27	NURDIN	VI	DUSUN NGARAI
28	SWALOON	VI	DUSUN PASIR KOTA BARU
29	ZAINAL	VI	DUSUN PASIR KOTA BARU
30	NURDIANA	VII	DUSUN NGARAI
31	DARWIS	VII	DUSUN KAMPUNG BARU
32	ABDUL HANAFI/RAENSAH	VIII	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
33	M. YATIM	VIII	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
34	ABDUL WAHAB HSB	IX	DUSUN PASAR SENEN
35	YUSNI	X	DUSUN NGARAI

Sumber data : *Kantor Kepala Desa Koto Tinggi*

Tabel di atas adalah menjelaskan tentang masyarakat yang menerima bantuan Rumah Sederhana Layak Huni yaitu sebanyak 35 Kepala Keluarga dari hasil ferifikasi akhir yang ditetapkan oleh OMS. Penilaian OMS berdasarkan

rangking kemiskinan yang tertinggi dan sudah memenuhi kriteria sebagai masyarakat yang berhak menerima bantuan pemukiman bagi masyarakat miskin yang ada di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

**Tabel I.2**  
**DAFTAR YANG TIDAK MENERIMA BANTUAN RSLH HASIL**  
**PERIFIKASI AKHIR DESA KOTO TINGGI KECAMATAN RAMBAH**  
**KABUPATEN ROKAN HULU**

NO	NAMA CALON	RANKING	TEMPAT TINGGAL
1	RAENSAH	III	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
2	AISYAH	IV	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
3	NURMA	V	DUSUN LUBUK BANDUNG HULU
4	MATUN	V	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
5	WARINO	VI	DUSUN WONOSARI BARAT
6	NASIR	VI	DUSUN NGARAI
7	NURSINAR	VI	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
8	ROFI'AH	VII	DUSUN NGARAI
9	NURDIN	VII	DUSUN NGARAI
10	DAMRI	VII	DUSUN NGARAI
11	AHMAD	VII	DUSUN PASIR KOTA BARU
12	ZAINAB	VII	DUSUN LUBUK BANDUNG HULU
13	KARIA	VII	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
14	HENDRI	VII	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
15	M. TAWIS	VII	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
16	YULIAR	VII	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
17	HASNAH	VII	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
18	HUSNI TAMRIN	VIII	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
19	YENDRA	VIII	DUSUN KAMPUNG BARU
20	SITI RAHMAH	VIII	DUSUN KAMPUNG BARU
21	DARMADI	VIII	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
22	YULIANI	VIII	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
23	SYAHRIL NST	IX	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
24	PONARI	IX	DUSUN PASAR SENEN
25	SAERUDDIN	IX	DUSUN NGARAI
26	MUHAMMAD NASIR	IX	DUSUN PASIR KOTA BARU
27	SURONO	IX	DUSUN WONOSARI BARAT
28	BASRI	IX	DUSUN WONOSRI TIMUR
29	TOMMY LBS	X	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
30	YATIM	X	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
31	SIANTAR	X	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
32	DARWIS	X	DUSUN KAMPUNG BARU
33	PARNO	X	DUSUN KAMPUNG BARU
34	SUDIRMAN	X	DUSUN KAMPUNG BARU
35	JUPRIDIN	X	DUSUN NGARAI
36	SAWALDI	X	DUSUN NGARAI
37	JEFRIZAL	X	DUSUN NGARAI
38	T. AMIRUDIN	X	DUSUN NGARAI
39	SAMSIBAR	X	DUSUN PASIR KOTA BARU
40	DALIUS	X	DUSUN PASIR KOTA BARU

41	GUNTUR	X	DUSUN WONOSARI BARAT
42	YUSAFRI	X	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
43	SUBIR	XI	DUSUN KAMPUNG BARU
44	ADI HABIBI	XI	DUSUN NGARAI
45	JAMHUR	XI	DUSUN PASIR KOTA BARU
46	HAMDI	XI	DUSUN LUBUK BANDUNG HULU
47	JON KENNEDI	XI	DUSUN LUBUK BANDUNG HULU
48	PANGADUAN NST	XI	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
49	YURIZAL	XI	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
50	NAFSIAH	XII	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
51	YUSBAINI	XII	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
52	YUWENDRI	XII	DUSUN PASIR KOTA BARU
53	HASNAH	XII	DUSUN PASIR KOTA BARU
54	MUSBARI	XII	DUSUN PASIR KOTA BARU
55	NASRUN	XII	DUSUN PASIR KOTA BARU
56	SURTINAH	XII	DUSUN WONOSRI TIMUR
57	SAHRUDDIN NST	XII	DUSUN PASAR SENEN
58	ASMADI	XIII	DUSUN KAMPUNG BARU
59	MISNA SUPANDI	XIII	DUSUN KAMPUNG BARU
60	SAHRI. C	XIII	DUSUN KAMPUNG BARU
61	SARIPUDDIN	XIII	DUSUN KAMPUNG BARU
62	SUHAIRI	XIII	DUSUN PASIR KOTA BARU
63	MUSLIM	XIII	DUSUN PASIR KOTA BARU
64	MAFRIADI	XIII	DUSUN PASIR KOTA BARU
65	ANDI	XIII	DUSUN PASIR KOTA BARU
66	BAHAMAT LBS	XIII	DUSUN PASAR SENEN
67	MIKI ANDI PUTRA	XIII	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
68	DARMAN	XIV	DUSUN KAMPUNG BARU
69	LUKMAN	XIV	DUSUN KAMPUNG BARU
70	HARIS	XIV	DUSUN PASIR KOTA BARU
71	JASRUL	XIV	DUSUN LUBUK BANDUNG HULU
72	SUPEMRI	XV	DUSUN WONOSRI TIMUR
73	SYAHRIJAL LBS	XV	DUSUN PASAR SENEN
74	SOLEHAN	XV	DUSUN KAMPUNG BARU
75	ISKANDAR	XV	DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR

Sumber data : *Kantor Kepala Desa Koto Tinggi*

Tabel di atas menjelaskan bahwa sebanyak 75 kepala keluarga yang tidak mendapatkan bantuan Rumah Sederhana Layak Huni dari hasil verifikasi akhir untuk penerima RSLH. Jika ditinjau dari ranking masih banyak kepala keluarga yang lebih membutuhkan dari pengadaan RSLH tersebut, seperti yang terdapat pada table I.2 di atas yaitu Raensah yang dinilai tingkat kemiskinannya pada ranking III, Aisyah pada ranking IV, Nurma dan Matun pada ranking V,

Warino, Nasir dan Nursinar pada rangking VI, kemudian pada rangking VII yaitu Rofi'ah, Nurdin, Damri, Ahmad, Zainab, Karia, Hendri, M. Tawis, Yuliar dan Hasnah, mereka adalah sebagian masyarakat yang sudah memenuhi sarat dan kriteria yang layak sebagai penerima bantuan pemukiman rumah sederhana layak huni tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengadaan rumah layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dengan memilih judul :

**“Analisis Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Dalam pengadaan Rumah Layak Huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dan persoalan yang penulis kemukakan di atas maka diperlukan mencari titik temu akar dari permasalahan. Menurut pandangan penulis, program pengadaan rumah sederhana layak huni adalah salah satu upaya pemerintah provinsi Riau dalam memerangi dan memberantasi kemiskinan. Dalam hal ini tidak lepas dari peran Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang akan menjalankan fungsi pengawasannya secara langsung di lapangan. Maka dari penjelasan di atas dapat penulis rumuskan suatu masalah pokok yaitu :

**“Bagaimanakah Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam Pengadaan Rumah Layak Huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ?”**

**C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dan menganalisis tugas dan tanggung jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam pengadaan Rumah Layak Huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

**D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian dapat berguna untuk :

1. Bahan informasi kepada Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengadaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat miskin di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bahan referensi salah satu sumber informasi penelitian berikutnya yang pokok permasalahannya sama.
3. Untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah diterima oleh penulis selama mengikuti perkuliahan.



## **E. Sistematika Penulisan**

Muatan skripsi ini disusun menjadi satu bab dan terdiri dari beberapa aspek dengan gambaran sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II : Telaah Pustaka**

Merupakan bab yang berisikan tentang beberapa teori yang melandasi penulisan ini yaitu tentang pemerintahan, konsep pembangunan, pembangunan daerah, partisipasi masyarakat, Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) bidang rumah layak huni, kerangka pikiran, hipotesis, konsep operasional, variable penelitian dan teknik pengukuran.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini digunakan untuk menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisa data.

### **BAB IV : Gambaran Umum Penelitian**

Bab ini berisikan tentang gambaran umum Desa Koto Tinggi dan tentang Organisasi Masyarakat Setempat (OMS).

**BAB V : Hasil dan Analisa Data**

Merupakan bab yang berisikan tentang identitas responden, tugas dan tanggung jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam pengadaan rumah layak huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

**BAB VI : Kesimpulan dan Saran**

Merupakan suatu bab penutup dan penulis mengambil beberapa kesimpulan dan saran yang mungkin berguna untuk meningkatkan kinerja Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) agar lebih selektif dalam melakukan pendataan masyarakat miskin, kemudian partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan pemerintah harus menyediakan tenaga teknis untuk kepentingan pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bratakusumah, dkk, 2003. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*  
PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamim, sufian, 2003. *Administrasi dan Manajemen Pembangunan*,  
Pekanbaru :  
UIR Pers
- Hamim, Sufian dan Indra Muchlis Adnan, 2005. *Sistem Perencanaan  
Strategis  
Dalam Pembangunan*, Pekanbaru.
- Kartono, Kartini, 2003. *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin  
Abnormal itu?*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nasution, Zulkarimen, 2004. *Komunikasi Pembangunan; Pengenalan Teori dan  
Penerapannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nazir. M., 1999. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu, 1987. *Metodologi Sosial dan Pembangunan*, Penerbit  
Bina  
Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1991. *Kibernetology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta : Rineka  
Cipta.
- \_\_\_\_\_, 1998. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1985. *Konsep Administrasi dan Administrasi Di Indonesia*, Jakarta,  
Bina Cipta.
- Rauf, Rahyunir, 2005. *Kelembagaan RT dan RW (Sejarah, Hakekat dan Prospek  
Kelembagaan*. Pemerintah Kota Pekanbaru. Riau.
- Saparin, Sumber, 1986. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*,  
Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Siagian, Sondang P., 2008, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : Bina Aksara.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta, LP3S.

Soemarwoto, Otto, 1993, *Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Suryadi, A., 1975, *Kepemimpinan dan Pembangunan*, Penerbit Alumni, Bandung.  
Suryaningrat, Bayu, 1987. *Pemerintahan, Administrasi Desa dan Kelurahan*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta.

Safiie, H. Inu Kencana, dkk, 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2004. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia*. Bandung : CV. Mandar Maju.

\_\_\_\_\_, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Tjokroamijoyo, B., 1987. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3S, Jakarta.

Tjokroamijoyo, B. Dan Mustopadidjaya, 1993. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES. Jakarta: Gunung Agung.

Thoha, Miftah, 2001. *Kepemimpinan dalam Manajemen, Satu Pendekatan Prilaku*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung

Arikunto, Suharsimi, 2002. *Manajemen Penelitian*. Reka Cipta, Jakarta

#### Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
Buku Saku Pembangunan Masyarakat Desa 2000, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi Riau, 2000.

Lampiran 1 Peraturan Gubernur Riau Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2009.

Surat Keputusan Kepala Desa Koto Tinggi Nomor : 05/SK/V/2008 Tentang Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Koto Tinggi.